

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pendidikan bukanlah semata-mata proses transformasi sosial dan psikologis pada tingkat mikro individual. Di dalamnya juga menyusup dan tersangkut masalah pedagogik makro nasional, karena pendidikan itu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Penjelmaan evolusi sistem pendidikan terbentuk oleh berbagai tekanan, baik yang berasal dari luar sistem pendidikan--tantangan faktor eksternal-- seperti kebutuhan ekonomi masyarakat, aspirasi sosial dan budaya, maupun kekuatan lainnya yang berasal dari dalam sistem pendidikan itu sendiri.

Pengaruh faktor-faktor sosial itu menampakkan diri dalam peningkatan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan, yakni satu proporsi yang cukup besar dari penduduk yang menginginkan untuk memperoleh pendidikan. Peningkatan aspirasi pendidikan adalah manifestasi dari interaksi sikap sosial yang kompleks dan gejalanya tercermin dalam arus siswa pendaftar yang semakin deras semenjak tingkat SD yang seterusnya mendesak tingkat pendidikan berikutnya hingga ke tingkat perguruan tinggi.

Kekuatan sosial dan ekonomi yang selalu berubah itu menekan perluasan sistem pendidikan, dan menimbulkan ketegangan dalam sistem itu sendiri, seperti konflik dalam tujuan pendidikan: apakah yang diutamakan pembentukan pribadi atau ketrampilan, dan bagaimana program atau metode untuk mencapainya? Coombs (1968, h.4) menyebutkan ketegangan dalam sistem pendidikan itu dalam istilah krisis yang berakar pada tiga konsep utama: perubahan, adaptabilitas, dan disparitas.

Apabila disimak lebih mendalam inti persoalannya, maka lebih tepat krisis tersebut disebut krisis lembaga pendidikan formal yang sudah tak mampu lagi untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Karena itu, seperti kata Reimer (1973), tak satu pun negara yang dapat memenuhi kebutuhan warganya akan pendidikan dalam bentuk sekolah saja (de Jong, 1984, h. 104). Premis ini membuka perspektif pendidikan yang lebih luas berupa pendidikan alternatif, yakni pendidikan luar sekolah sebagai subsistem pendidikan yang diharapkan dapat memainkan peranannya untuk saling melengkapi, mendukung atau memperkuat dengan subsistem pendidikan formal dalam satu pola hubungan resiprositas yang dinamik.

Keberadaan subsistem pendidikan luar sekolah dan program-programnya semakin penting kedudukannya apabila dikaji kecenderungan tujuan pembangunan yang pada hakikatnya bersifat majemuk, yakni tidak semata-mata menekankan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga menekankan pencapaian tujuan sosial yang lebih luas seperti pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, perluasan peluang untuk memperoleh lapangan kerja yang memberikan penghasilan yang layak dan sebagainya.

Keberadaan sistem pendidikan tersebut semakin nyata apabila kita simak kecenderungan pembangunan di Indonesia selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini yang semakin berorientasi ke arah pembangunan sumber daya manusia. Mobilisasi segenap usaha telah diupayakan untuk merealisasi kebijaksanaan pembangunan yang tersurat atau paling tidak yang sering diucapkan melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan ditempatkan pada kedudukan strategis untuk membina sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan dimanfaatkan sebagai instrumen pembangunan, dan manusia ditempatkan pada kedudukan, yakni sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan.

Keberadaan subsistem pendidikan luar sekolah itu tidak dengan sendirinya tumbuh dan berkembang atau serta merta disambut kehadirannya sebagai obat mujarab, atau jalan pintas untuk memecahkan masalah sosial. Selain konsep-konsep dasarnya perlu dikaji kembali, maka programnya pun sebagai realisasi konkrit dari konsep dasar itu perlu disempurnakan dengan memanfaatkan fakta-fakta empirik yang digali dari proses implementasinya atau melalui analisis kritis terhadap persoalan-persoalan yang muncul di lapangan.

Apakah ciri-ciri utama dari suatu program yang berkembang dalam konteks pendidikan luar sekolah? Beberapa pertanda yang dapat dipakai adalah: (a) jangkauan program semakin luas untuk meraih partisipasi kelompok sasaran yang benar-benar memerlukannya; (b) manfaat program semakin banyak dinikmati oleh mayoritas kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkannya sesuai dengan rancangan; (c) intensitas partisipasi masyarakat dalam program bukan semata-mata dimobilisasi dari "atas", namun semakin didasarkan pada partisipasi otonom; (d) kebutuhan belajar semakin bangkit dari kelompok masyarakat itu sendiri dan tidak lagi semata-mata diintroduksi dari luar; (e) pengelolaan dan pengerahan sumber daya pendukung--material, finansial dan manusia--bagi pelaksanaan kegiatan belajar semakin mampu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atas dasar kepercayaan diri dan sikap mandiri; (f) efisiensi internal program semakin tinggi, yakni tercapainya tujuan maksimal dengan pemakaian sumber daya sehemat mungkin; dan (g) efisiensi eksternal

program semakin tinggi yakni program itu bukan saja dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang lebih mendalam, bahkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tentu saja perkembangan program itu bergerak maju secara evolusioner. Karena itu, ciri-ciri konkrit dari suatu program yang berkembang juga akan berkembang, karena kebutuhan manusia selalu berubah juga.

Program pendidikan luar sekolah yang diharapkan adalah tidak sekedar hanya menyentuh kebutuhan masyarakat. Tetapi program itu harus mampu membangkitkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang benar-benar dirasakan, hingga kemudian program itu mampu menghasilkan suatu akibat terutama peningkatan ketrampilan dalam arti luas, yakni warga belajar lebih mampu memahami masalah yang dihadapinya dan lebih cekatan dalam memecahkan masalahnya secara efisien. Pendek kata mereka lebih trampil dalam mengendalikan lingkungan fisik dan sosialnya guna menguasai hari depannya yang lebih baik. Inilah dampak program yang amat esensial.

Apabila kita mencoba menelaah dampak program pendidikan luar sekolah, maka program itu perlu dipahami sebagai salah satu bagian dari sebuah kerangka sosial yang lebih luas. Program yang dengan sengaja dihadirkan ke tengah-tengah masyarakat itu perlu dipahami sebagai salah satu faktor yang tidak independen, bahkan lebih tepat disebut sebagai salah satu subsektor dalam kerangka pembangunan, baik pada tingkat makro nasional maupun tingkat mikro lokal pedesaan. Persoalannya akan lebih dapat dipahami secara lebih mendalam apabila kita berhenti sejenak untuk menelaah kaitan antara berbagai program atau interaksi antara berbagai kekuatan yang memiliki potensi untuk menciptakan perubahan sosial, bahkan perubahan budaya.

Dalam keadaan kekuatan-kekuatan yang potensial untuk menimbulkan perubahan itu saling berkaitan, atau bahkan mungkin saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain, maka mungkin saja program pendidikan luar sekolah yang merupakan salah satu bentuk "intervensi" secara sengaja dalam rangkaian upaya rekayasa sosial, tidak mampu menimbulkan perubahan substansial. Penelaahan inti masalah semacam ini adalah tidak memadai apabila analisisnya terbatas pada efektivitas dan/atau efisiensi faktor internal dari sebuah program sebagai sistem tertutup. Persoalannya akan terungkap lebih jelas, jika diselami juga pengaruh faktor-faktor eksternal yang terdapat di sekitar program, dan dikaji bagaimana interaksi antara faktor internal dan eksternal itu.

Persoalannya menjadi semakin rumit, oleh karena dalam keadaan sedemikian banyak program yang diluncurkan ke arah pedesaan, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk terjadi yakni program-program tersebut tidak memberikan pengaruh yang saling memperlancar atau memperkuat, bahkan malah saling bersaing. Hal ini disebabkan karena dalam proses penerimaan paket-paket kegiatan yang mengandung spektrum informasi itu bisa terjadi disonansi kognitif pada individu atau khalayak sasaran penerima, hal mana berakar pada persepsi yang bersangkutan tentang ciri-ciri umum atau yang unik dari setiap paket, seperti besar kecilnya keuntungan yang terkandung di dalamnya, berat ringannya resiko apabila informasi itu diterima atau diterapkan, atau besar kecilnya peluang yang realistis untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Di tengah-tengah berbagai sumber kekuatan atau berbagai jenis program yang mengandung potensi untuk menimbulkan perubahan sosial itu, maka isu kritis adalah seberapa kuat impuls yang bersumber dari program

pendidikan luar sekolah mampu berperan sebagai tenaga "pelatuk" atau "trigger" bagi perubahan sosial atau pencapaian tujuan pembangunan?

Ada semacam kekhawatiran yaitu meskipun program tersebut secara konseptual mengandung potensi untuk menciptakan perubahan sosial, namun kekuatannya tidak memadai untuk menggerakkan perubahan di lingkungan sekitarnya. Lemahnya dampak yang diharapkan, bukan saja tertumbuk pada masalah-masalah yang berakar pada faktor-faktor seperti: (1) ciri-ciri individu atau khalayak penerima; (2) isi program; (3) perencanaan dan pengorganisasian program; (4) mobilisasi dan alokasi sumber daya; dan (5) efektivitas dari implementasi program, termasuk dukungan kemampuan administratif yang memadai, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi atau tersedianya infrastuktur fisik misalnya dalam bidang transportasi dan media komunikasi, dan infrastuktur sosial dan ekonomi seperti balai pengobatan, fasilitas pasar, koperasi, perkumpulan simpan pinjam atau organisasi sosial lainnya. Bahkan besar pula kemungkinan pengaruh dari ciri-ciri kultural dan faktor struktural yang memungkinkan pola tingkah laku baru hasil belajar dapat direalisasikan dalam praktek hidup sehari-hari.

Karena sedemikian banyak kemungkinannya hal-hal yang bisa mengalami perubahan dalam sebuah sistem sosial yang dinamik, maka perubahan yang dimaksud perlu dibatasi. Seperti dikemukakan Selo Soemardjan (1962, h. 3), perubahan yang bisa terjadi yakni: (1) perubahan sosial dan (2) perubahan kultural. Persamaan keduanya adalah menyangkut satu adaptasi atau perbaikan dalam cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam studi ini, konsentrasi masalah yang akan diselidiki adalah

terbatas pada perubahan sosial tingkat mikro individual sebagai dampak dari suatu program pendidikan luar sekolah, yakni Program Kejar Paket "A" yang dipadukan dengan pendidikan mata pencaharian. Perubahan itu terjadi karena partisipasi aktif dari warga belajar dalam program tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan dampak sosial dan psikologis dalam studi ini adalah proses perubahan mental--suatu kejadian yang tak pernah dipahami sepenuhnya--pada individu yang dimulai dari perubahan dalam aspek pengetahuan dan sikap tertentu untuk selanjutnya menimbulkan rangkaian akibat yang semakin mendalam, intensif dan meluas, dan kemudian melekat dalam perilaku nyata individu sebagai anggota dari sebuah sistem sosial.

Untuk memecahkan masalah pokok di sekitar dampak program, maka perlu dipertegas paradigma pendekatannya, selain perlu juga dijelaskan beberapa konsep kunci seperti modernisasi, perubahan sosial, dan pembangunan. Ketiga konsep yang relevan diperbincangkan dalam konteks pendidikan luar sekolah, berturut-turut dipaparkan sebagai berikut.

1. Pendidikan sebagai Subbagian dari Modernisasi

Asumsi utama yang dipegang teguh untuk memahami dampak program pendidikan luar sekolah adalah, pendidikan bukan faktor yang berdiri sendiri. Antara pendidikan dan masyarakat selalu ada kaitan dialektik; pendidikan merupakan produk masyarakat, dan dalam beberapa hal pendidikan menimbulkan perubahan tertentu pada masyarakat (Malassis, 1976, h. 23).

Karena itu, dalam studi ini tidak dianut pandangan idealisme yang memahami pendidikan terisolasi untuk dirinya sendiri. Juga tidak dianut pandangan voluntarisme yang berkeyakinan pendidikan mampu dan

harus mengubah dunia terlepas dari perubahan apapun dalam susunan masyarakat. Juga tidak sepenuhnya dianut pandangan determinisme mekanik yang memahami corak dan masa depan pendidikan itu secara langsung dipengaruhi oleh masyarakat di sekitarnya, dan sedikit banyak pendidikan diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya (Faure, dkk, 1972, h. 56).

Dengan demikian, studi ini mencoba untuk mengambil satu posisi yaitu menelaah proses perubahan sosial melalui pendekatan pendidikan yang berwawasan lingkungan, di mana faktor manusia dengan perubahan dalam dimensi perilakunya merupakan masalah sentral. Ini berarti bahwa pendekatan yang menitikberatkan pengembangan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, transformasi sikap atau pembangkitan potensi manusia yang semuanya dapat diubah menjadi energi untuk tujuan produksi atau jasa-jasa yang bermanfaat--dimensi sumber daya manusia--menempati kedudukan strategis dalam pembangunan. Karena itu, pemerataan pendidikan atau akses informasi sedemikian penting kedudukannya untuk mengatasi ketimpangan sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Melalui pendidikan, maka peranan seseorang dapat berubah, dan perubahan peranan akan mengakibatkan perubahan status, dan pada gilirannya perubahan status akan mengakibatkan perubahan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan cara memahami kaitan antara pendidikan dan masyarakat, paradigma yang dipakai untuk menghampiri masalah dampak program pendidikan luar sekolah adalah, pendidikan sebagai subbagian dari modernisasi. Paradigma ini adalah Tipe II dari keempat model teori yang dikembangkan oleh para sosiolog untuk mempelajari pendidikan dalam kaitannya dengan masyarakat secara keseluruhan. Tipe I dari model teori itu adalah, bahwa pendidikan sebagai proses yang relatif berdiri sendiri; Tipe III adalah, pendidikan sebagai reproduksi dari

hubungan kelas yang antagonistik; dan Tipe IV, pendidikan sebagai proses transformasi masyarakat antagonistik secara global (de Jong, 1984, h. 9).

Ciri utama dari Tipe I adalah, pendidikan tidak tegas dihubungkan dengan masyarakat, dan pendekatan untuk mempelajarinya yaitu pendekatan fungsional. Fokus masalah yang dipelajari adalah: (1) kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi mikro individual dan makro nasional; (2) efisiensi internal--seberapa produktif suatu lembaga pendidikan dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya yang sehemat mungkin; dan (3) efisiensi eksternal--seberapa relevan suatu program pendidikan dengan struktur kerja (okupasi) yang terdapat di dalam masyarakat.

Pemecahan masalah pertama tadi bertolak dari asumsi bahwa pendidikan merupakan investasi modal manusia, dan hipotesanya adalah, bahwa antara pendidikan dan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara terdapat hubungan yang erat. Hipotesa itu diuji dengan beberapa pendekatan yang di antaranya adalah analisis korelasi-regresi berdasarkan indikator pendidikan dan tingkat pendapatan dari pendidikan tertentu.

Beberapa penelitian telah mengungkapkan masalah tersebut, seperti dilaporkan oleh Blaug (1970), dan Schultz (1963) yang hasilnya konsisten dalam menjelaskan adanya kontribusi nyata dari pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya Anderson (1963) mengungkapkan tingkat melek huruf yang memadai bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terdapat ambang (threshold) tertentu, yakni tingkat melek huruf sebesar 40 persen merupakan prasyarat untuk mencapai pendapatan lebih dari \$ 300 AS, dan tingkat melek huruf sebesar 90 persen untuk merealisasi tingkat pendapatan lebih dari &\$ 500 AS (Blaug, 1970; de Jong, 1984, h. 34). Sementara itu, Peaslee (1967) menyimpulkan, ambang bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah 10 persen dari warga

masyarakatnya menamatkan pendidikan hingga tingkat SD (Blaug, 1970, h. 64).

Isyu efisiensi internal pendidikan intinya adalah tentang kontribusi berbagai masukan yang dapat dinyatakan dalam uang dan bagaimana pengaruhnya terhadap keluaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai tambah berupa sifat-sifat psikologis. Implikasinya terutama bagi alokasi sumber daya. Persoalan spesifik yang diselidiki adalah bagaimana memproduksi murid bermutu dengan biaya minimal. Isyu efisiensi eksternal pendidikan intinya adalah tentang relevansi pendidikan dengan struktur kerja di masyarakat.

Kritik terhadap model teori Tipe I tadi adalah, analisisnya sangat mengandalkan data kuantitatif, dan unit analisisnya pada umumnya adalah suatu negara. Karena diutamakan profil hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara umum, maka terabaikan variasi atau keunikan tertentu. Model teori Tipe I itu agaknya kurang relevan untuk mempelajari dampak pendidikan terhadap pendapatan atau produktivitas para petani atau pengrajin yang pada dasarnya adalah "self-employed", yakni mereka mengelola sendiri kegiatan produksinya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Di kalangan petani atau pengrajin subsisten yang umumnya mengandalkan padat karya, maka tingkat pendapatan mereka sukar diukur dengan teliti. Dalam pada itu, produktivitas usahanya juga banyak dipengaruhi oleh keadaan yang tidak menentu, seperti pengaruh faktor cuaca, tata air, serangan hama, yang bertalian dengan kondisi alam sekitar; juga pengaruh faktor pasar seperti fluktuasi harga, bahkan kebijaksanaan pemerintah atau lembaga tertentu yang sukar diprediksi dengan cermat.

Ciri utama model teori Tipe III adalah, proses pendidikan dipahami dalam tatanan masyarakat yang menampakkan hubungan antagonistik. Fokus

masalah yang diselidiki terutama aspek demokratisasi pendidikan dan kemustahilan untuk mencapainya. Pendidikan dipandang justru memproduksi antagonisme hubungan sosial; pendidikan pada gilirannya menciptakan pembagian kelas (de Jong, 1984, h. 88).

Dalam situasi demikian akan timbul konflik antara kelompok berstatus tinggi dan yang berstatus rendah karena didorong oleh pasar kerja dan kualifikasi ketrampilan yang berhubungan dengan jenis dan tingkat pendidikan yang disyaratkan oleh pekerjaan. Sama sekali tak dapat dielakkan, "kelompok atas" itu berusaha mempertahankan status quo, sedangkan "kelompok bawah" mendesak terus kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Memang ada semacam paradoks apabila pendidikan ditinjau dari model teori Tipe III tadi, yaitu di satu pihak pendidikan bertujuan untuk mendukung terjadinya perubahan struktural, namun di pihak lain, pendidikan menciptakan lapisan-lapisan sosial. Kehadiran program pendidikan luar sekolah yang memihak lapisan bawah dan disediakan untuk menjangkau kelompok sasaran yang meluas dan massal sesuai dengan kebutuhannya akan membantu mengurangi ketegangan sosial.

Ciri utama dari model teori Tipe IV adalah, bahwa proses pendidikan ditempatkan dalam kerangka dunia yang selalu berubah (de Jong, 1984, h. 102). Salah satu teori yang relevan untuk membahas masalah ini adalah teori struktural dari Johan Galtung (1971) yang memahami interaksi antara negara maju dan berkembang berlangsung dalam pola hubungan asimetris. Terdapat polarisasi kedudukan, yakni dua bagian yang sebenarnya dalam satu sistem. Karena itu ada istilah "marginal poles" dan "dominating nucleus" (Quijano), dan istilah "negara-negara pusat dan negara-negara periferi" (Sunkel dan Paz, 1970). Pihak sentrum semakin mapan kedudukannya karena terus menerus mengembangkan

kebudayaannya, sedangkan pihak periferi atau "pinggiran" mengambil alih kebudayaan sentrum dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kebudayaan tertentu yang mungkin tersebar karena kemajuan teknologi komunikasi.

Teori Galtung memang tidak menjangkau masalah pendidikan. Tapi Illich dan Reimer misalnya, tampil mempermasalahkan hal itu dan mengangkat isu pertentangan dengan tekanan pada ketergantungan yang diciptakan sistem pendidikan itu sendiri yang dinilai bersifat represif dan tidak menguntungkan kelompok miskin.

Dalam model teori Tipe II--pendidikan sebagai subbagian dari modernisasi--dengan tegas pendidikan ditempatkan dalam sebuah pelataran yang lebih luas atau dalam kerangka masyarakat sebagai sebuah sistem sosial. Paradigma ini berpijak pada konsep modernisasi itu sendiri yang cenderung dipahami sebagai suatu proses penggerogotan atau transformasi tatanan tradisional ke tatanan modern. Pendekatan pendidikan memandang proses modernisasi dimulai dari tingkat individu melalui transformasi sikap dan nilai.

Dalam proses modernisasi ada dua fungsi penting pendidikan, yaitu: (1) fungsi alokasi, dan (2) fungsi sosialisasi (de Jong, 1984, h. 66). Fungsi alokasi ini berkaitan dengan peranan pendidikan untuk mendukung faktor ekonomi. Disyaratkan bagi setiap orang dalam masyarakat untuk memperoleh posisi atas dasar prestasi pribadi. Karena itu dalam masyarakat modern menjadi semakin jelas status dan peranan yang menghasilkan stratifikasi sosial. Tiap orang menduduki statusnya atau menempati "ruang sosial" tertentu. Akibat pendidikan, maka ada peluang bagi seseorang untuk mengalami mobilitas sosial ke arah vertikal. Sese-

orang dapat beralih statusnya dari yang rendah ke yang tinggi. Bahkan juga mungkin terjadi mobilitas horisontal seperti migrasi tenaga kerja, yakni orang yang berpendidikan atau berketrampilan lebih baik cenderung berpindah ke tempat lain yang menunjukkan diferensiasi kerja yang lebih tegas dan terperinci.

Fungsi alokasi pendidikan dari mazhab kedua ini relevan untuk diperbincangkan dalam rangka menelaah kontribusi program pendidikan luar sekolah, meskipun kita tidak melambungkan harapan yang muluk-muluk tentang kemampuan program itu sendiri untuk menempatkan seseorang dalam kedudukan yang layak sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilannya. Dalam batas-batas atau kasus tertentu, peningkatan pengetahuan dan/atau ketrampilan yang dicapai seseorang melalui program pendidikan luar sekolah akan dapat mengisi lowongan kerja yang menuntut persyaratan tertentu.

Kemungkinan terpenuhinya fungsi alokasi pendidikan ini memang tak terpisahkan dengan kondisi situasional atau kebijaksanaan dalam hal penempatan tenaga kerja. Kata Santoso (1984, h. 14), kebijaksanaan tersebut akan mempengaruhi situasi pasaran ketrampilan dalam masyarakat pada suatu waktu, dan kebutuhan dan penyediaan tenaga dalam pasaran ketrampilan pada waktunya akan mendorong sistem pendidikan dan latihan untuk mengadakan penyesuaian yang diperlukan. Namun demikian, hasil pengamatan sepiantas menunjukkan, program-program pendidikan luar sekolah di Indonesia masih belum mampu sepenuhnya memenuhi fungsi alokasi pendidikan, terlebih-lebih karena pasaran ketrampilan belum jelas benar di Indonesia.

Fungsi sosialisasi menekankan peranan pendidikan untuk membentuk ciri-ciri pribadi modern, sehingga pendidikan adalah semacam proses akulturasi, bahkan proses difusi, terutama jika ditinjau dari arus penyampaian informasi atau kebudayaan. Pendidikan berfungsi untuk menjembatani kelompok maju dan kelompok terkebelakang.

Isyu yang muncul dari model teori Tipe II ini adalah terutama dari fungsi sosialisasi pendidikan, yaitu apa generalisasi ciri pribadi modern yang paling determinan? Apakah yang dimaksud adalah kemampuan untuk berempati (Lerner), motif berprestasi (McClelland) atau ciri pribadi lainnya? Dalam hal fungsi alokasi pendidikan, maka selain belum jelas benar pasaran kerja dan ketrampilan yang dibutuhkan, maka tidak selalu status seseorang bertalian dengan tingkat pendidikannya.

Meskipun ada beberapa keberatan yang muncul dari dalam model teori Tipe II, namun model itu nampaknya cukup relevan dipakai untuk memahami dampak program pendidikan luar sekolah di Indonesia, khususnya program Kejar Paket "A" yang dipadukan dengan pendidikan mata pencaharian. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, model teori itu konsisten dengan paradigma bahwa pendidikan merupakan subbagian dari pembangunan menuju modernisasi. Kedua, pendekatan itu konsisten dengan teknik peluncuran program yang berlandaskan azas difusi inovasi. Ketiga, pendekatan itu konsisten dengan karakteristik kelompok sasaran yang umumnya terlalakan pendidikannya dan membutuhkan bantuan sengaja untuk mengubah beberapa ciri tradisional yang masih melekat pada mereka agar bergeser ke arah ciri-ciri modern dalam sebuah garis kontinum. Keempat, pendekatan itu akan dapat memenuhi keinginan untuk memperoleh gambaran dan eksplanasi yang lebih mendetail tentang dampak program terutama berdasarkan pra kondisi yang terdapat di dalam suatu masyarakat di mana program itu berlangsung. Akan diperoleh gambaran tentang pola kaitan antara beberapa faktor sebagai sebuah profil umum, bahkan penjelasan dari aspek kualitatif yang menunjukkan keunikan tertentu tentang program yang sukar terlukiskan secara kuantitatif yang diharapkan mengkristal menjadi konsep-konsep yang sah.

Agar jelas pengertian modernisasi dan perubahan sosial, maka

kedua konsep tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

2. Modernisasi dan Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi pada tingkat mikro individual atau makro sistem sosial, mula-mula didorong oleh impuls tertentu--praktek baru atau inovasi--yang apabila bukan berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dengan sengaja diintroduksi ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Tahap adopsi terhadap impuls perubahan--meminjam paradigma difusi inovasi--terjadi melalui proses pembuatan keputusan, sebagai peristiwa mental yang bersifat selektif dan diskriminatif pada diri seseorang individu.

Kemampuan untuk membuat keputusan memantulkan sifat hakiki manusia sebagai makhluk berkesadaran yang mampu mempersepsi secara indrawi bahkan secara emotif keadaan di sekitarnya untuk menghasilkan makna-makna tertentu tentang realitas.

Berger (1974, h. 173) merumuskan pengertian modernisasi bertolak dari konsep kesadaran. Ia mengartikan modernisasi adalah perubahan dalam makna-makna yang menghidupi manusia, sebagai sebuah revolusi dalam struktur kesadaran. Perubahan yang terjadi berdasarkan pada kebebasan memilih, apakah tradisi sebagai fakta kehidupan yang dulu dijunjung tinggi untuk selanjutnya boleh ditinggalkan atau tidak oleh seseorang.

Popularitas istilah modernisasi bukanlah karena kesanggupannya sebagai sebuah istilah generik yang cermat dan tajam untuk mengungkapkan suatu pengertian yang mudah dipahami dan dikomunikasikan, baik antara sesama anggota masyarakat akademis maupun di kalangan khalayak awam. Istilah itu cenderung dipakai karena kemampuannya untuk me-

rangkum pengertian yang menunjukkan berbagai aspek transformasi dalam semua aspek kehidupan manusia. Sejumlah definisi yang telah dirumuskan itu, pada umumnya menunjukkan isi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan definisi modernisasi itu dapat dipahami karena para ahli yang merumuskannya berbeda dalam hal (1) fokus masalah yang menjadi perhatian; (2) keluasan lingkup masalah yang dianalisis; dan (3) tingkat abstraksi pengertian yang dikemukakan, mulai dari pengertian yang sifatnya umum hingga ke penjabaran indikator yang lebih konkrit.

Sebuah definisi yang sifatnya umum dikemukakan Huntington (1968); modernisasi diartikan sebagai satu proses perubahan multifaset dalam semua lapangan pemikiran dan aktivitas manusia (Tipps, 1975, h. 201). Modernisasi dipandang sebagai satu tipe perubahan sosial yang bukan saja menghasilkan dampak tertentu, namun terjadi keadaan perubahan maju berantai dengan akibat-akibatnya yang luas. Karena itu istilah "multi faset" di sini cenderung menyatakan terjadinya transformasi pada suatu lembaga akan menyebabkan terjadinya transformasi pada lembaga lain.

Keragaman makna istilah modernisasi nampak pula dalam fokus masalah yang dibahas. Para ekonom memahami modernisasi dari sudut pengertian terjadinya aplikasi teknologi untuk mengontrol sumber daya alam guna meningkatkan pertumbuhan pendapatan penduduk. Para sosiolog dan antropolog menekankan pada proses difusi dan diferensiasi yang menandai ciri modern. Para ilmuwan bidang politik lebih menekankan analisisnya pada pembangunan pemerintah suatu negara; bagaimana pemerintah meningkatkan kapasitas untuk memulai suatu perubahan, mengatasi konflik sosial, dan menjawab tuntutan terhadap perubahan merupakan objek analisisnya (Weiner, 1966, h. 3).

Dari sudut pengertian yang menekankan kapasitas manusia, Schwartz (1972, h. 76) mengungkapkan kembali definisi modernisasi menurut Max Weber, yakni sebagai ekspansi rasional manusia untuk mengontrol lingkungan sosial dan fisik di sekitarnya. Harper (1966) menitikberatkan makna modernisasi pada kapasitas institusi untuk mengadaptasi dirinya dengan perubahan atau mengontrol perubahan yang cenderung berlangsung cepat dan berkesinambungan. Bendix (1967) berpendapat bahwa modernisasi adalah satu tipe perubahan sosial. Schoorl (1980) menekankan pengertian modernisasi sebagai satu tipe perubahan dengan kata kunci adalah transformasi yang menunjukkan perubahan masyarakat dalam segala aspeknya seperti perubahan ekonomi, politik, dan budaya. Di antara ciri terpenting masyarakat modern, kata Schoorl (1980, h. 4) adalah penerapan pengetahuan, sejalan dengan konsep ekspansi rasional dari Max Weber. Namun Schoorl mengemukakan ciri-ciri modernisasi yang lebih operasional ketimbang penulis lainnya.

Eisenstadt (1966, h.43) justru menekankan bahwa modernisasi itu ditandai oleh dua ciri, yaitu (1) sebagai satu tipe perubahan sosial dan diferensiasi struktural; dan (2) sebagai tipe respons terhadap perubahan. Sebagai satu tipe perubahan, maka yang terjadi adalah proses di mana ikatan sosial, ekonomi dan psikologis yang kolot ditinggalkan secara berangsur-angsur hingga kemudian dicapai satu pola sosialisasi dan perilaku baru. Eisenstadt menekankan perubahan evolusioner dari tatanan tradisional ke tatanan modern.

Faktor apakah yang dirobah dalam proses modernisasi itu; secara operasional Tjondronegoro mengemukakan, bahwa modernisasi itu adalah perubahan tradisi, sikap dan sistem nilai, (Prisma, No. 4 April, 1978).

Rogers (1971, h. 10) memahami modernisasi dari sudut pengertian pola respons dan adaptasi terhadap nilai budaya suatu bangsa. Ia menekankan peralihan dari ciri tradisional ke ciri modern sebagai satu kontinum. Karena itu, Rogers dan Shoemaker (1971, h. 32-33) mengungkapkan ciri-ciri suatu sistem sosial yang tradisional dan yang modern tidak dalam pengertian sebuah dikhotomi yang ekstrim. Sistem sosial modern ditandai dengan ciri lebih berorientasi maju, teknologi maju, ilmiah, rasional, kosmopolitan, dan lebih mampu berempati. Durkheim menyebutkan ciri sistem sosial tradisional adalah "conscience collective" dan ciri modern adalah "conscience individuelle" (Messadi, 1975; UNESCO, 1975, h. 15). Pokok pengertian modernisasi seperti dikemukakan Rogers dan Shoemaker tersebut di atas menunjukkan bahwa masih ada tempat bagi tradisi. Persoalannya adalah seberapa banyak tradisi itu disisakan, dan apa alat untuk menyaringnya. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura mengatakan dalam sambutannya di East-West Centre, Honolulu pada tanggal 11 Nopember 1970: "Pemimpin setiap negara baru mesti menentukan berapa banyak harus melepaskan yang tua untuk mendapatkan kemajuan dan lalu masih ada cukup suatu yang asli dan khas" (To Thi Anh, 1974, h. 3). Dalam sistem sosial modern yang kurang terencana dengan baik bisa muncul eksek yang tak diharapkan seperti tumbuhnya kampung kumuh di kota besar, atau gejala hidup yang teralienasi secara sosial dan spiritual, dan sebagainya.

Suatu analisis secara empirik tentang pengertian modernisasi dilakukan Alex Inkeles berdasarkan survei yang dilakukannya di enam negara. Dia mengemukakan generalisasi dari ciri-ciri sikap modern seperti disunting Weiner (1964, h. 4) yang inti sarinya sebagai ber-

ikut:

- (1) kesiapan menerima ide dan metode baru;
- (2) kesiapan mengekspresikan opini;
- (3) kesadaran terhadap konsep waktu sehingga lebih tertarik pada masa kini dan yang akan datang ketimbang masa lampau;
- (4) lebih peduli terhadap perencanaan, organisasi dan efisiensi;
- (5) menyadari ketetapan waktu;
- (6) memahami dunia sebagai sesuatu yang bisa diperhitungkan;
- (7) percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (8) Percaya pada keadilan distribusi.

Konsep perubahan sosial yang dikemukakan Zaltman, Kotler dan Kaufman (1972, h. 2) lebih banyak dititikberatkan pada aspek perubahan sosial berencana sehingga prinsip "rekayasa sosial" amat diutamakan. Maksudnya adalah, bahwa ada tujuan tertentu yang ingin dicapai dan untuk itu ada impuls perubahan yang dengan sengaja direncanakan dan diintroduksi untuk menimbulkan perubahan perilaku individu atau khalayak sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh para tenaga atau lembaga perubah. Karena itu semua elemen yang ada dalam proses perubahan itu dikendalikan, mulai dari impuls, jenis impuls, media penyampaiannya hingga ke soal perencanaan khalayak sasarannya.

Konsep tersebut di atas memang mengandung implikasi yang serius ditinjau dari etika dalam perubahan sosial atau apabila ditinjau dari hakikat individu yang memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan. Segi negatif dari perekayasa sosial menurut definisi tersebut tadi adalah, perubahan itu seolah-olah terjadi secara mekanistik dan individu seolah-olah sasaran pasif.

Lawan dari perubahan sosial berencana adalah yang tidak berencana atau perubahan sebagai akibat kekuatan alamiah. Alinsky (1965) menjelaskan, bahwa banyak taktik perubahan sosial tergolong tak berencana; sering pula hal ini irasional, tapi benar-benar terjadi. Menurut Halpin (1969) perubahan tak berencana itu adalah "free change" yakni bisa terjadi sesuatu yang justru tidak dikehendaki (Zaltman, Kotler, dan Kaufman, 1972, h. 2). Maka apabila dicoba untuk dibuat perbedaan yang tajam antara kedua jenis perubahan berencana dan tak berencana kuncinya terdapat pada unsur kesengajaan untuk mengintroduksi teknik baru dari suatu sistem budaya atau sistem sosial ke suatu sistem lainnya.

Rogers dan Shoemaker (1971, h. 7) menjelaskan pengertian perubahan sosial sebagai proses di mana terjadi pergeseran dalam struktur dan fungsi dalam sebuah sistem sosial. Struktur suatu sistem sosial dibangun oleh status individu sedangkan fungsi dari tiap elemen yang membangun struktur status itu adalah peranan atau tingkah laku nyata dari individu yang menduduki status itu. Definisi itu nampaknya dikonsepsikan atas dasar teori sistem. Perubahan bermula dari perubahan fungsi yang bertalian dengan status, sehingga jelas bahwa perubahan itu berawal dari tingkat mikro individual. Perubahan mikro individual pada gilirannya akan menimbulkan perubahan makro sosial yang selanjutnya dapat mempengaruhi perubahan mikro individual melalui proses sosialisasi.

Perubahan merupakan satu gejala universal dan selalu terdapat pada semua sistem sosial, meskipun bagaimana tertibnya perilaku para anggotanya. Untuk kebutuhan analisis, perubahan itu dapat dibagi menjadi kategori-kategori tertentu. Jika ditinjau dari dimensi waktu,

maka ada perubahan yang berlangsung selama jangka waktu pendek, dan ada pula selama jangka panjang; ditinjau dari tempo perubahan, maka ada perubahan yang cepat dan yang lambat; ditinjau dari dampak perubahan, maka ada yang luas dan yang terbatas; ditinjau dari ujud perubahan, maka ada yang bersifat latent dan yang manifest; dan jika ditinjau dari unit analisisnya, maka ada perubahan yang terjadi pada tingkat individu (mikro), kelompok (meso), dan masyarakat (makro). Sedangkan akibat perubahan itu ada yang bersifat struktural, dan yang bersifat fungsional, atau kedua-duanya.

Hakikat perubahan itu adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dinamik. Hal ini akan jelas apabila dibandingkan keadaan sekarang dengan keadaan pada masa sebelumnya sebagai patokan. Kecenderungan perubahan, ada yang bersifat kuantitatif dan yang bersifat kualitatif. Kecenderungan perubahan itu juga bergerak ke arah kemajuan, meskipun juga bisa sebagai kemunduran dengan akibat yang merugikan atau malah meresahkan, atau tidak menyenangkan pihak yang mengalaminya.

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat ditegaskan pengertian modernisasi dan perubahan sosial dalam studi ini. Modernisasi dipahami bukan sebagai euphemisme westernisasi; modernisasi cenderung sebagai satu tipe respons yang terjadi mula-mula pada tingkat mikro individual. Perubahan yang terjadi pada tingkat mikro individual ini terutama berkenaan dengan transformasi sikap dan sistem nilai, semacam penggerogotan tatanan tradisional untuk berubah menjadi tatanan modern. Karena itu, perubahan yang terjadi dapat juga dipahami sebagai proses yang bergerak dalam sebuah garis kontinum, sehingga ciri-ciri tradisional dan ciri-ciri modern tidak dibedakan atau dipisahkan sebagai

sebuah dikhotomi. Modernisasi pada taraf individual itu bermula dari bangkitnya kesadaran atau akulturasi pada domain kognitif, sehingga seseorang mampu membuat keputusan, apakah sesuatu yang lama mesti diganti dengan yang baru. Ini berarti, modernisasi tak lain semacam ekspansi rasional atau perluasan wawasan pada diri seseorang individu sehingga dia akan mampu merespons atau bahkan menguasai lingkungan sekitarnya. Peningkatan kemampuan ini pada hakikatnya adalah peningkatan daya adaptabilitas.

Proses peralihan dari ciri tradisional ke modern itu dirangsang oleh stimulus yang berasal dari luar suatu sistem sosial, dan pergeseran ciri tradisional-modern itu tidak secara mekanistik, karena pihak penerima--individu atau khalayak--adalah bersifat otonom dan berkemampuan untuk menapis atau membeda-bedakan apa yang patut untuk diterimanya dan diintegrasikan dalam perilakunya sehari-hari. Proses penerimaannya juga dipengaruhi oleh faktor kultural atau struktural, sehingga tak selalu hasil yang tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi, dengan kata lain, modernisasi merupakan satu tipe perubahan sosial.

Yang dimaksud perubahan sosial dalam studi ini adalah perubahan sosial tingkat mikro individual yang terjadi pada waktu relatif berjangka pendek. Perubahan itu tiada lain adalah perubahan pola tingkah laku, yang dipahami sebagai perubahan akibat seseorang berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang berlangsung dengan intensitas, frekuensi, variasi dan kadar kontinuitas tertentu menghasilkan perubahan berupa penambahan pengetahuan, perubahan atau pemantapan sikap, dan/atau peningkatan ketrampilan yang selanjutnya mengakibatkan pertumbuhan infrastruktur sosial atau ekonomi.

Perubahan pola tingkah laku individu pada gilirannya akan dapat mempengaruhi perubahan fungsinya dalam suatu sistem sosial, sehingga dapat pula menyebabkan perubahan struktural.

Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan sosial berencana melalui rangsangan program pendidikan, meskipun tak dapat diabaikan kemungkinan terjadinya perubahan sosial tidak berencana seperti terjadinya perubahan akibat kontak antara dua budaya, umpamanya antara kaum transmigran etnis Jawa dan Bali dengan etnis pribumi seperti dalam kasus yang diselidiki yaitu di Kalimantan Tengah.

Jadi, hakikat perubahan sosial yang dimaksud adalah penambahan, perbaikan atau penguatan yang juga melibatkan pola adaptasi individu atau masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Sumber perubahan dapat berasal dari luar suatu sistem sosial dan dapat juga berasal dari dalam masyarakat itu sendiri.

3. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan yang dianut oleh suatu masyarakat mencerminkan ide pemecahan krisis aktual dan sekaligus suatu proyeksi tujuan ke masa depan yang ingin dicapai, mirip suatu janji tentang kehidupan yang lebih baik. Masalah aktual yang dihadapi manusia diungkapkan dari hal-hal yang bersifat umum hingga ke hal-hal yang bersifat spesifik. Coombs dan Ahmed (1972, h. 10) mengemukakan tiga macam krisis yang melanda negara berkembang yaitu: (1) ledakan jumlah penduduk; (2) penyediaan tanah; dan (3) penyediaan lapangan kerja. Dalam ungkapan yang berbeda, Kereet Joshe (1977) mengemukakan masalah umum yang dihadapi manusia dewasa ini adalah penambahan penduduk, kemiskinan, buta huruf, dan keterlantaran pendidikan yang dialami oleh anak-anak

usia sekolah (Napitupulu, 1980, h. 60).

Krisis itu berakar pada hakikat perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pembahasan tentang berbagai krisis seperti dalam pertumbuhan ekonomi dan persediaan enersi, laju pertumbuhan penduduk, atau pengrusakan lingkungan dan lain-lain pada umumnya sekaligus mengugut keabsahan lembaga yang ada di masyarakat termasuk lembaga pendidikan. Perkembangan pendidikan justru merupakan fungsi dari perkembangan sejarah, dan pendidikan mengandung jejak masa lampau. Rupanya saatnya sekarang pendidikan itu membantu menciptakan sejarah (Faure, dkk , 1972, h.3).

Di antara masalah kritis itu, kemiskinan merupakan cultural focus--sebuah konsep sosiologi dan antropologi--yang berarti satu bidang kehidupan yang lebih banyak memperoleh perhatian dalam kehidupan masyarakat (Selo Soemardjan, 1984, h. 3). Persoalan itu tetap relevan untuk diperbincangkan karena berkaitan langsung dengan kualitas manusia dan berbagai implikasi yang bertalian dengan harkat manusia. Gani (1984) dalam tulisannya menjelaskan pengertian kualitas manusia sebagai sebuah totalitas yang utuh, suatu kesatuan unsur fisik dan non-fisik dalam hubungan yang erat (Prisma, No. 4 1984).

Pembahasan masalah kritis, baik kemiskinan kultural maupun kemiskinan struktural pada dasarnya tidak sekedar memaparkan apa ciri lapisan masyarakat yang tidak beruntung itu, berapa besar proporsinya, tetapi juga membahas mengapa hal itu terjadi dan bagaimana pemecahannya. Pembahasan tentang siapa yang miskin dijelaskan dalam indikator konkrit seperti yang dirumuskan oleh Sajogyo yakni berdasarkan pemenuhan kebutuhan pokok dengan patokan nilai takar beras minimal. Untuk daerah pedesaan diperlukan minimal 240 kg dan daerah perkotaan minimal

360 kg ekuivalen beras per jiwa per tahun (Sajogyo, 1975; Emil Salim, 1980, h. 56). Direktorat Tata Guna Tanah Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri (1978) memakai ukuran pemenuhan 9 kebutuhan pokok meliputi beras, gula, minyak tanah, minyak kelapa, ikan (asin), tekstil, garam, sabun dan kain (batik). Apabila pendapatan penduduk per kapita lebih tinggi dari 200% nilai kebutuhan pokok maka daerah itu dinyatakan bukan miskin (Emil Salim, 1980, h. 80). Emil Salim juga mengemukakan beberapa ciri kualitatif tentang kualitas yang tak dimiliki penduduk miskin yaitu: (1) mutu tenaga kerja yang tinggi; (2) jumlah modal yang memadai; (3) luas tanah dan sumber alam yang cukup; (4) ketrampilan dan keahlian yang cukup tinggi; (5) kondisi fisik jasmaniah dan rohaniyah yang cukup baik; dan (6) lingkungan hidup yang memungkinkan perubahan dan kemajuan (Emil Salim, 1980, h. 76).

Pada tahun 1980 ditaksir dari seluruh penduduk di Indonesia sebesar 35% masih berada di bawah garis kemiskinan, di antaranya 17% masih dalam keadaan melarat dengan pendapatan Rp. 168,00/orang/hari (Mubyarto, Soetrisno dan Dove, 1984, h. 2). Meskipun kecenderungan kemiskinan absolut di Indonesia menurun -- hasil Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS)--tapi masih terdapat ketimpangan pendapatan (Thee Kian Wie, 1981, h.52).

Ditinjau dari jenis kemiskinan yang bertalian dengan faktor penyebabnya maka dikenal istilah (1) kemiskinan kultural, dan (2) kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural terjadi berlandaskan asumsi bahwa kemiskinan disebabkan karena keterbelakangan dalam hal pengetahuan, informasi, sikap atau sistem nilai tertentu yang tak mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena itu dalam konteks pendidikan luar sekolah sering dikemukakan sebuah proposisi: kemiskinan material disebabkan karena

kemiskinan pendidikan atau informasi. Namun sebaliknya, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu mereka tidak dapat menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo Soemardjan, 1980, h. 5).

Pandangan yang kedua ini merupakan anti tesis pandangan pertama yang memakai model difusi sebagai acuan. Menurut pandangan pertama tadi, melalui difusi teknologi dan pengetahuan, seolah-olah tak terelakkan akan terjadi peralihan dari ciri masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Para teoritikus dari Amerika Latin justru memahami kemiskinan itu sebagai akibat dari ketergantungan. Menurut hipotesa para teoritikus ketergantungan itu, seperti Prebesch (1959), Dos Santos (1970), Quijano (1976), Cardoso (1972), dan Chilcote (1974), keterbelakangan itu pada dasarnya diciptakan.

Teori ketergantungan atau dependensi, selanjutnya melahirkan teori marginalitas. Yang dimaksud dengan marginalitas adalah suatu proses di mana sebagian besar dari penduduk suatu negara tidak berpartisipasi dalam aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan politik di negeri itu (O'Sullivan, 1981; McAnany, 1981, h. 75). Konsep marginalitas ini pertama kali dipergunakan oleh Germani (1973), Quijano dan Weffort (1973) untuk menggambarkan situasi kehidupan di daerah "slum".

Untuk mengangkat kaum marginalitas itu maka perlu diberikan pendidikan dan jasa sosial yang cukup sehingga mereka mampu berperan dalam sektor produktif. Germani (1973) menunjukkan bahwa konsep marginalitas berakar pada tiga hal, yakni: (1) perluasan hak-hak manusia sesuai dengan prinsip persamaan dan kebebasan, seperti juga halnya peningkatan

"konsientisasi" atau kesadaran terhadap prinsip tersebut; (2) proses kontak budaya dan konseptualisasi budaya marginal seperti dirumuskan oleh para antropolog; dan (3) peningkatan proses modernisasi dan perluasannya di luar negara Barat, bahkan di wilayah tradisional di dalam negara Barat itu sendiri (McAnany, 1981, h. 75). Namun O'Sullivan (1981) mengemukakan masalah marginal itu akarnya jauh lebih dalam. Seperti kata para sosiolog, akarnya adalah dalam bidang ekonomi terutama dalam sistem produksi.

Tanpa mengabaikan faktor struktural, maka asumsi yang dipegang adalah, bahwa kemiskinan material karena kemiskinan informasi. Hasil studi yang diungkapkan Thee Kian Wie (1981, h. 72) mengenai ketimpangan pendapatan di beberapa negara justru dengan jelas menunjukkan bahwa ketimpangan itu bukan saja karena ketimpangan pembagian asset fisik, tetapi juga ketimpangan pembagian ketrampilan manusia. Dengan demikian, pola pembagian ketrampilan yang lebih merata melalui perluasan program pendidikan umum (terutama pendidikan dasar) dan kejuruan adalah sama pentingnya dengan usaha meredistribusi asset fisik.

Yang menjadi persoalan adalah, apakah jenis pendidikan yang mampu mengangkat kelompok marginal itu dari ketertinggalan yang amat mendalam? Hasley (1975) mengemukakan, perubahan dalam struktur ekonomi dan lingkungan di dalam masyarakat memberikan pengaruh terhadap perubahan sosial. Pendidikan dapat dipakai sebagai alat untuk menciptakan perubahan masyarakat misalnya dalam hal persamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan atau peningkatan kualitas kerja. Namun Hasley berhati-hati dalam membuat kesimpulan, bahwa pengaruh pendidikan semacam itu bukan berarti sebagai satu generalisasi yang konsisten secara universal karena dalam keadaan tertentu harapan terlampaui berlebihan

terhadap pendidikan. Kasus pengalaman Amerika ternyata mengecewakan dalam memerangi kemiskinan (UNESCO, 1975, h. 14).

Jadi jelaslah bahwa ada batas-batas tertentu dari persoalan yang dapat dipecahkan oleh pendidikan. Messadi (1975) malah lebih berhati-hati menyimpulkan peranan pendidikan, bahwa pendidikan itu dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang terbatas, sebagai alat untuk mengubah ciri-ciri masyarakat pada umumnya, misalnya dalam hal pemerataan kesempatan kerja atau peningkatan kualitas kerja (UNESCO, 1975, h. 15). Nilai tambah pendidikan dalam bentuk peningkatan revenu nasional diperoleh dari peningkatan kualitas tenaga kerja (UNESCO, 1975, h. 48).

Sarino Mangonpranoto dalam ceramahnya yang berjudul "Pendidikan Sebagai Sistem Perjuangan Kemerdekaan Indonesia" (24 Mei 1976) menekankan keseimbangan tujuan pendidikan sebagai subsistem pembangunan bangsa, yakni di satu pihak akan mengarah ke pembentukan pribadi, akan tetapi di lain pihak sekaligus memandangnya sebagai "subjek pembangunan" yakni sebagai tenaga kerja yang potensial yang melalui pendidikan, pengajaran dan latihan dalam batas kemampuannya dapat menjadi tenaga kerja yang terdidik.

Apabila orang sempat menganalisis definisi pembangunan satu persatu, maka kesimpulan yang diperolehnya adalah, bahwa isi definisi itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Upaya menemukan suatu pengertian yang konsisten sebagai abstraksi dari kegiatan dan tujuan, rupanya sia-sia belaka, karena perumusan definisi pembangunan itu menggunakan paradigma yang berbeda-beda dan tak lepas dari konteks masalah pembangunan yang berbeda-beda pula. Namun tetap ada persamaannya, yakni semuanya mengacu pada makna perubahan yang direncanakan dan

diarahkan agar tercapai pertambahan kuantitatif atau kualitatif.

Ada dua macam konsep pembangunan. Pertama, pembangunan sebagai sebuah konsep dengan tujuan bersifat "open ended". Rumusan tujuannya sedemikian abstrak dan seolah-olah tak akan pernah berakhir. Kedua, pembangunan bertujuan untuk mencapai perubahan mikro--suatu perubahan yang sifatnya nyata--di suatu lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini dinyatakan dalam istilah "pemenuhan kebutuhan manusia" (Kindervatter, 1979, h. 35).

Definisi pembangunan yang bersifat umum dikemukakan oleh Siagian (1981, h. 3) sebagai berikut:

. . . pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara atau pemerintah, menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa.

Definisi tersebut lebih mencerminkan pandangan seorang ahli manajemen, dan inti pengertian yang tercakup dalam definisi itu menekankan perspektif perubahan yang berlangsung secara evolusioner. Sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar dan berencana, ada kecenderungan konsep pembangunan tersebut di atas berorientasi pada perekaya-
 saan sosial pada tingkat makro suatu bangsa. Di situ ditegaskan arah pembangunan yakni modernisasi, namun tidak dijelaskan apakah modernisasi yang dimaksud identik dengan industrialisasi atau mencakup semua perubahan yang terjadi dalam ekonomi, sosial, politik, dan bahkan budaya.

Dalam perumusan yang lebih abstrak, beberapa penulis seperti Bryant dan White (1982) dan Hettne (1982) menjelaskan bahwa pembangunan bersifat normatif, yakni ada suatu tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang ingin dicapai itu bukanlah semata-mata perkembangan dan pertumbuhan

ekonomi saja, tetapi realisasi dari potensi manusia (Bryant dan White, 1982, h. 3). Pandangan Todaro tentang pembangunan mencerminkan paham kaum humanis. Pembangunan merupakan sebuah proses multi-dimensi yang mencakup perubahan dalam unsur sosial, sikap masyarakat yang luas dan hubungan nasional seperti halnya pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketegangan dan penghapusan kemiskinan (Bryant dan White, 1982, h. 3).

Bryant dan White, dalam bukunya Managing Development in The Third World (1982), mengupas makna pembangunan yang jauh lebih kompleks pengertiannya dari modernisasi, perkembangan, atau perubahan. Tujuan pembangunan adalah: (1) meningkatkan kapasitas; (2) empowerment; (3) memperhatikan keselarasan dengan alam sekitar; dan (4) meningkatkan kemampuan administrasi. Peningkatan kapasitas, bukan saja ditekankan pada kemampuan individu, tapi juga kapasitas ekonomi, karena tanpa kemajuan ekonomi, apapun program yang ditawarkan kepada masyarakat sukar untuk diterima atau dilaksanakan. Sebagai sebuah proses "empowerment" maka pembangunan ditekankan pada peningkatan kemampuan dan daya masyarakat untuk mengatasi ketergantungan kepada kaum penguasa atau untuk menghadapi tekanan dari pimpinan politik. Dimensi ini menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan. Apabila hal ini tercapai, maka semakin terbuka lebar peluang bagi anggota masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.

Karena disadari bahwa pembangunan itu juga merupakan sebuah proses penggerogotan atau penghancuran sumber alam sekitar, maka Bryant dan White juga menggarisbawahi perlunya diperhatikan kelestarian alam, suatu hal yang ada pula kaitannya dengan pandangan koeksistensi pada tingkat global untuk menjelmakan sebuah "Desa Global", ide McLuhan. Dalam pada itu, peningkatan kemampuan administratif merupakan kebutuhan penting.

Pokok pengertian pembangunan yang dikemukakan Bryant dan White tadi terutama ditinjau dari proses dan tujuannya, dan hal itu tak lepas dari pengaruh beberapa kecenderungan paham tentang pembangunan dewasa ini. Apabila ditinjau dari segi tujuannya, maka Tjondronegoro lebih menekankan pembangunan untuk mencapai perubahan struktural, suatu pandangan yang diangkat langsung dari masalah aktual di Indonesia. Tendensi pokok fikirannya tentang pembangunan tertuju pada pembangunan ekonomi, khususnya sektor produksi dan distribusi yang merata dan mantap (Prisma, No. 4 April, 1978). Makna penting dari pandangan Tjondronegoro tentang pembangunan adalah untuk menata kembali struktur masyarakat sehingga terpotong ketergantungan vertikal yang menjelmakan ketidakadilan seperti ketergantungan buruh dengan majikannya, atau ketergantungan buruh tani dengan patronnya.

Perubahan struktural, kata Soedjatmoko (1984, h. 164) harus mampu melenyapkan semua ketegangan dalam struktur sosial yang memperkuat kemiskinan dan ketidakadilan yang sekaligus menjamin demokrasi dan kebebasan. Isyu keadilan sosial mengandung aspek etika dan nilai. Ukuran nilai yang dipakai para penentu kebijaksanaan tidak akan bersifat kontroversial atau dapat diterima oleh semua orang (Mubyarto, 1983, h. 79).

Pemikiran strategis untuk memecahkan masalah umum yang dihadapi manusia menghasilkan beberapa pendekatan. Pada dekade 1960-1970, diterapkan pendekatan "trickle down" yang menekankan pertumbuhan ekonomi untuk menghela kaum miskin ke dalam proses modernisasi ekonomi. Namun yang terjadi adalah ekonomi dualistis yang gawat, yakni pembangunan disertai penurunan absolut dalam rata-rata pendapatan kaum miskin (Adelman dan Morris, 1978; Korten, 1984, h. 12; Bryant dan White, 1982,

h. 9). Pengalaman di Mexico, India dan Thailand menunjukkan ketimpangan pendapatan (Kindervatter, 1979, h. 3). Teori "trickle down effect" dan "spread effect" yang diterapkan dalam pola pembangunan di negara berkembang tidak berhasil memecahkan masalah pangan, kemiskinan dan pembagian pendapatan yang tidak merata (Emil Salim, 1980, h. 47). Akumulasi modal rendah di negara berkembang karena masyarakat miskin sukar untuk menabung dan orang kaya cenderung menabung kekayaannya misalnya dalam real estate ketimbang investasi kapasitas produktif (Blaug, 1970, h. 1).

Kegagalan mengatasi kemiskinan dengan model "trickle down" itu menyebabkan lahirnya gagasan baru, yaitu pembangunan dengan pemerataan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti dicetuskan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (1976). Namun kemudian lahir lagi pemikiran baru yakni "redistribusi sebelum pertumbuhan" (Adelman, 1978; Emil Salim, 1980, h. 49). Menurut Adelman, pemerataan hasil pembangunan tergantung pada pemerataan faktor produksi penting, sehingga perlu redistribusi asset produksi. Karena itu penting usaha land reform dan penyebaran pendidikan untuk pembentukan modal manusia (human capital). Pemenuhan kebutuhan pokok bukan semata-mata mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memenuhi lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, nutrisi, perumahan, dan kesejahteraan sosial (Donald, 1972; Kindervatter, 1979, h. 39).

Dalam skala mondial, kemiskinan global itu oleh para teoritikus dependensi dibahas dari beberapa aspek. Hudson dan Goulet (1971) mengungkapkannya dalam konsep "lack or a lag" yakni absennya teknologi di negara berkembang seperti yang dimiliki negara maju merupakan penyebab keterbelakangan. Baran (1957) menjelaskan keterbelakangan itu merupakan

akibat alamiah dari sistem kapitalis yang menekankan peningkatan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara berteknologi maju itu sendiri. Galtung (1971) memahami ketergantungan itu dari aspek ketidakseimbangan kemampuan teknologi negara maju dan negara berkembang; hal inilah yang merupakan akar masalah ketergantungan negara berkembang kepada negara maju. Goulet (1975) menonjolkan ketimpangan hubungan atau struktur paternalisme yang mendominasi hubungan negara berteknologi maju dan negara Dunia Ketiga dalam bidang politik, ekonomi dan budaya.

Ketergantungan itu dapat diputuskan dengan beberapa cara sehingga terwujud tata dunia baru. Wiber dan Weaver (1975) menjelaskan, ketergantungan itu diputuskan melalui perubahan struktur internal yakni pemerataan pendapatan. Sedangkan Grant (1972) berpendapat, ketergantungan itu diatasi melalui adopsi industri padat karya, produksi barang kebutuhan pokok (bukan barang lux), land reform, penyediaan jasa sosial yang cocok dengan kebutuhan kaum miskin, penyediaan kredit, dan mendorong kaum miskin ini untuk menabung.

Parmer (1975) menonjolkan self-reliance sebagai ciri hakiki dari pembangunan, sehingga suatu negara akan menolak untuk menerapkan pendekatan pembangunan yang meniru pendekatan negara lainnya. Negara-negara seperti Tanzania, Kuba dan RR Cina telah menerapkan model ini dengan cara membangun ekonominya sesuai dengan sumber daya yang ada di negara itu. Kesemuanya ini berkaitan dengan sifat percaya diri dan mandiri dari suatu bangsa.

Berlandaskan pada kenyataan tentang dampak keterbelakangan terhadap harkat manusia berupa dehumanisasi dan terhambatnya pencapaian realisasi potensi manusia, maka Denis Goulet dalam bukunya The Cruel Choice (1971) mengemukakan isu "kebudayaan kemiskinan".

Goulet mengkritik pendekatan pertumbuhan ekonomi sebagai pendekatan "anti pembangunan" karena mengutamakan materi, namun mengabaikan aspek kualitatif dari kehidupan manusia. Pandangan Goulet yang mencerminkan pandangan kaum humanis ini menempatkan manusia bukan sebagai objek dan instrumen untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, tetapi merupakan subjek. Pembangunan merupakan alat bagi sekelompok masyarakat untuk mengaktualisasi nilai-nilai yang paling teguh dipegangnya.

Kelompok humanis merumuskan makna pembangunan sebagai pembebasan dari kemiskinan. Pembangunan berarti merangsang harga diri atau mampu memilih masa depan yang lebih baik. Inti pertanyaan kaum humanis, suatu *causa finalis*: pembangunan itu untuk apa? Jika hanya sampai pada peningkatan konsumsi kebutuhan pokok, hal itu tidak cukup. Karena itu Todaro (1977) merumuskan inti nilai pembangunan, seperti disunting kembali oleh Bryant dan White (1982, h. 14) sebagai berikut:

- (1) life sustenance: pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok; tanpa itu mustahil ada kehidupan;
- (2) self-esteem: pembangunan adalah untuk meningkatkan kemampuan sehingga seseorang menjadi diri pribadi, dan harga diri adalah satu rasa berguna dan dihargai, tidak diperalat oleh orang lain;
- (3) freedom from servitude: pembangunan adalah untuk meningkatkan kemampuan memilih; kebebasan di sini tidak dipahami semata-mata dari sudut pengertian ideologi dan politik, akan tetapi juga dari sudut pengertian yang lebih mendasar yakni suatu emansipasi dari keterasingan kondisi material, dan bebas dari "perbudakan".

Masih ada beberapa alternatif lain tentang konsep pembangunan yang ditandai dengan penekanan pada aspek tertentu. Alternatif lain adalah pembangunan yang menekankan partisipasi masyarakat dan kontrol masyarakat terhadap tujuan serta proses pembangunan itu sendiri.

Hasil studi yang dilakukan Owers dan Shaw (1972) di beberapa negara Dunia Ketiga menunjukkan, derajat partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Inti sari pendekatan yang mereka sebut "broad base" itu adalah, bahwa modernisasi suatu masyarakat mencakup perubahan kembali struktur hubungan antara pemerintah dan rakyat, sehingga rakyat banyak akan dapat memberikan sahamnya kepada kebijaksanaan nasional yang mempengaruhi kehidupan mereka. Langkah pertama dalam pembangunan adalah mengatur sejumlah rakyat luas dalam suatu kelembagaan lokal yang otonom dan menghubungkannya dengan tingkat kegunaan ekonomi yang lebih tinggi. Rakyat luas baru dapat diharapkan untuk ikut menanamkan modalnya dalam ekonomi modern apabila mereka percaya bahwa mereka itu merupakan bagian dari ekonomi modern itu dan dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan itu.

Masih dalam lingkup pembicaraan pembangunan partisipatif, Korten dalam makalahnya yang berjudul "Reflection on Development Theory and Method" (1983) menjelaskan konsep pembangunan yang menekankan partisipasi dalam istilah "pembangunan yang memihak rakyat". Konsep ini berlandaskan pada azas swa kelola dan memandang tujuan pembangunan dari perspektif evolusioner ke arah realisasi kemampuan terpendam dari umat manusia. Korten mengatakan, teknik sosial yang menekankan peranan orang per orang adalah tidak sekedar disentuh, oleh karena yang penting untuk diamalkan adalah upaya yang dibentuk di sekitar rakyat, nilai-

nilai dan arus informasi guna menanggapi kepentingan dan kebutuhan tertentu yang dikehendaki oleh lingkungan.

Pendekatan yang menekankan partisipasi masyarakat sering disebut pendekatan "bottom up" (Soedjatmoko, 1982) atau pembangunan yang melibatkan rakyat, kata Koentjaraningrat dalam seminar pembangunan Irian Jaya pada tgl. 29 April s/d 2 Mei 1984 di Jakarta. Koentjaraningrat membagi tipe-tipe masyarakat Irian Jaya berdasarkan ciri-ciri sosial-budayanya dan berdasarkan ciri-ciri itulah pembangunan Irian Jaya sebaiknya dilaksanakan.

Kuitenbrouwer dalam makalahnya yang berjudul "Toward Self-Reliant Integrated Development" (1975) menguraikan bahwa pembangunan yang sehat tidak bisa diwujudkan dengan mengatasnamakan rakyat, dan atas dasar itu dilakukan pembangunan untuk rakyat. Pembangunan sejati hanya bisa terjadi apabila dilaksanakan melalui rakyat, oleh rakyat dan bersama-sama rakyat. Praktek-praktek yang bersifat memanfaatkan manusia dan alam sebagai instrumen belaka tak bisa diteruskan. Untuk merealisasi kesemua hal itu, Kuitenbrouwer mengemukakan dua hal pokok yaitu: (a) pembebasan diri dari kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang saling berkaitan yang mewujudkan monopolisasi dan alienasi; (b) transformasi internal yang dibutuhkan guna menciptakan basis bagi pembangunan swadaya.

Berdasarkan pemahaman tentang pentingnya hak yang merata bagi segenap anggota masyarakat untuk mengontrol sumber dan arah pembangunan, Gutierrez (1973) merumuskan pengertian pembangunan sebagai pembebasan dari kekangan dan untuk perkembangan kepribadian manusia. Adapun kekuatan yang mengekang itu adalah kemiskinan, pengangguran, dan

ketidakmerataan sehingga kriteria utama untuk membuat perencanaan pembangunan, menurut Seers (1969) adalah, apakah pembangunan itu mengurangi ketidakmerataan (Kindervatter, 1979, h. 44).

Dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi dan krisis pangan dan enersi yang semakin meningkat pada tahun 1973 dan 1974, maka Yayasan Dag Hammarskjold pada tahun 1975 merumuskan model alternatif yang disebut "another development" yang menekankan pemuasan kebutuhan pokok melalui pembagian sumber daya yang tersedia secara merata. Seperti tertulis dalam dokumen Toward a New Strategy for Development (1979, h. 75) inti sari dari model pembangunan untuk memenuhi "kebutuhan-kebutuhan pokok baru" itu adalah sebagai berikut.

- (1) Need Oriented: pemuasan kebutuhan dasar--material dan non-material-- lapisan masyarakat tertindas sebagai penghuni terbanyak isi bumi ini. Pemuasan kebutuhan dasar itu dimulai dengan penghapusan kemiskinan. Bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar itu, maka pemanusiaan manusia dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan untuk berekspresi, mengembangkan kreativitas, memperluas persamaan dan pemahaman terhadap hak-haknya.
- (2) Endogenous and Self-Reliant: perumusan nilai dan masa depan harus dimulai dari hati sanubari masyarakat, dan setiap masyarakat percaya terhadap kekuatannya sendiri dan sumber-sumber yang dimilikinya berupa enersi dari sumber daya manusia, lingkungan alam dan kebudayaannya.
- (3) Ecologically Sound: penekanan pada hubungan harmonis dengan lingkungan alam, pemanfaatan secara rasional sumber-sumber biosfir yang disertai dengan kesadaran bahwa potensi dari

ekosistem lokal, sebagaimana halnya ekosistem global yang memiliki keterbatasan, baik bagi generasi yang ada sekarang maupun yang akan datang.

- (4) Based on Structural Transformation: pembangunan yang didasarkan pada transformasi struktural diperlukan di dalam relasi sosial, kegiatan ekonomi dan distribusi spasial, seperti juga halnya dalam struktur kekuasaan, sehingga dapat direalisasi kondisi swakelola dan partisipasi dalam pembuatan keputusan oleh siapa saja yang terkena oleh keputusan itu, apakah dari masyarakat pedesaan atau perkotaan, hingga masyarakat dunia secara keseluruhan (Kindervatter, 1979, h. 47).

Prinsip keempat tersebut di atas merupakan jawaban terhadap kenyataan yang ada yakni mekanisme pasar internasional sebagai sebuah skenario permainan negara kuat, sehingga negara berkembang harus berpartisipasi dalam dunia internasional secara selektif dan bergerak menuju Dunia Ketiga yang mandiri secara kolektif (Vente, Bhatthal, dan Nakhoda, 1981, h. 201).

Model pembangunan alternatif yang tercakup dalam konsep "another development" tadi membuka sebuah perspektif baru tentang pembangunan, karena di dalamnya tercakup secara komprehensif pemenuhan kebutuhan multi dimensi yang berwawasan lingkungan, bukan saja pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder, tetapi juga kebutuhan lain yang berakar pada sikap mandiri yang berkaitan dengan konstelasi hubungan manusia pada tingkat lokal, regional bahkan global yang ingin ditata kembali melalui transformasi struktural. Keberhasilan untuk menciptakan perubahan struktural itu akan ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.

Ketergantungan pada skala global yang terwujud dalam pola an asimetris itu hanya akan dapat diterobos terutama melalui kegiatan kolektif dari negara-negara berkembang berlandaskan prinsip mandiri yang berarti, ada otonomi yang bersifat selektif dan kreatif dari negara yang bersangkutan. Pada tingkat mikro individual, ketergantungan secara vertikal itu dapat diputuskan melalui pendidikan yang mampu merealisasi potensi peserta didik, tidak semata-mata sebagai proses sosialisasi yang tidak memberikan peluang bagi peserta didik untuk membuat pilihan.

Tulang punggung dari kebangkitan baru itu adalah pemerataan pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi. Namun demikian, meskipun kita percaya terhadap mitos kemampuan teknologi dan industrialisasi, masih tetap diharapkan bahwa teknologi dan industrialisasi itu hadir tidak sekedar untuk memperkokoh keabsahan pandangan materialisme. Ilmu pengetahuan dan teknologi tetap perlu mendukung nilai-nilai dasar seperti keadilan, cinta-kasih, demokrasi, perlindungan terhadap orang miskin, kerelaan berbagi kekayaan dan kebahagiaan, dan orientasi terhadap kebutuhan generasi di masa yang akan datang.

Karena suatu negara seperti Indonesia mustahil mandiri secara eksklusif dan interdependensi antara negara-negara tak terelakkan akibat kemajuan teknologi komunikasi, maka perlu disadari bahaya intervensi budaya kapitalis dan sekuler yang dapat menyebabkan diabaikannya pemenuhan kebutuhan spiritual. Hassan dalam makalahnya yang berjudul "The Implication of Science and Technology Education and Development on Islamic Value" (1981), mengingatkan adanya gejala "sensate culture", "pop hedonism" dan apa yang disebut "the transparent life" menurut istilah Daniel Bell (1976).

Pitirim Sorokin (1964) merumuskan pengertian "sensate culture" dan "sensate society" sebagai berikut:

. . . is based upon the ultimate principle that true reality and values are sensory and that beyond the reality and values which can see, hear, smell, touch and taste there is no other reality and no real values. . . Despite its lip-service to the values of the Kingdom of God, it cares mainly about the sensory values of wealth, health, and bodily comfort, sensual pleasure and lust for power and fame. Its dominant ethic is invariably utilitarian and hedonistic . . . Its politics and economics are also decisively utilitarian and hedonistic (Vente, Bhathal, dan Nakhooda, 1981, h. 200).

Satu di antara akibat dari budaya yang memandang tinggi nilai kenikmatan lahiriah itu adalah orang berperilaku atas dasar "panutan ganda" atau "double standard" (Sorokin, 1964; Hassan, 1981; Vente, Bhathal, dan Nakhooda, 1981, h. 200). Maksudnya adalah, di depan umum seseorang menyatakan ketaatannya terhadap nilai dan falsafah idealistis yang tinggi, tapi dalam kegiatannya sehari-hari yang bersangkutan mengikuti tujuan, ideologi dan nilai-nilai materialistis, komersial, dan mencari keuntungan yang kesemuanya amat berbeda dengan isi propagandanya yang muluk-muluk dan ideal itu.

Daniel Bell menjelaskan budaya "pop hedonism" itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang amat mementingkan nilai pada kemewahan indrawi yang nampak, seperti dalam penampilan pakaian, fotografi, iklan, televisi, acara bepergian yang mewah dan perilaku konsumtif yang kesemuanya itu. itu hanya mungkin terjadi karena revolusi di bidang teknologi. Menurut Bell, ekonomi konsumtif itu menemukan realitasnya pada penampilan nyata sebagai tanda prestasi. Peningkatan status sosial dilakukan dengan mengadopsi satu gaya hidup yang khas, seperti masuk menjadi anggota satu klub hobi yang mahal, kegiatan bepergian dan lain-lain yang menandai

seseorang sebagai anggota sebuah komunitas konsumtif.

Jika demikian halnya, apakah yang disebut kebutuhan pokok "baru" dalam konsep pembangunan alternatif tadi hanya sampai pada pemenuhan kebutuhan pokok dan self-reliance? Sudah cukup jelas bagi kita, tujuan pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya. Ditinjau secara filsafati hal itu dapat dipertanggungjawabkan, disebabkan karena pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang menuju suatu "budaya terpadu", yakni satu budaya yang mengintegrasikan kebutuhan fisik dan kebutuhan moral-spiritual manusia. Kualitas moral dan spiritual sebagai kebutuhan manusia yang paling mendasar harus dipadukan ke dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik, seni dan lain-lain. Jadi, nilai panutan tersebut merupakan peleburan nilai budaya yang inheren dalam peranan ganda manusia sebagai "Khalifah Allah" dan "Hamba Allah".

Sikap yang berorientasi pada pandangan positivistic, rasional, pragmatis, utilitarian, progresif, pentingnya ketrampilan tenaga kerja, dan sekuler dalam pembangunan janganlah sampai memencilkan manusia -- dalam keadaan menikmati kemajuan--dari Tuhan, dari manusia sesamanya, dan dari alam sekitarnya. Bahaya keadaan teralienasi semacam itu dapat dicegah oleh kesadaran manusia tentang hakikat dirinya sebagai bagian dari suatu kehidupan yang lebih besar, suatu totalitas, yang menurut Sikun Pribadi (1971, h. 34-35) intinya adalah tanggung jawab.

Keputusan moral bukan semata-mata karena kemampuan manusia menyadari masalahnya secara rasional berdasarkan persepsi indrawi, tetapi untuk memahami realitas secara lengkap perlu dilengkapi dengan persepsi yang bersumber dari fu'ad atau qalb atau "mata hati" (Sarkar, 1977; Vente, Bhathal, dan Nakhoda, 1981, h. 203).

Berdasarkan uraian terdahulu, maka konsep pembangunan dalam studi ini adalah pembangunan yang bertanggung jawab untuk menuju modernisasi

yang mengintegrasikan secara utuh kebutuhan fisik, moral-spiritual manusia. Pembangunan bukan saja menekankan pemenuhan kebutuhan pokok yang primer dan sekunder, tapi juga menekankan penghapusan rasa tidak berdaya pada diri masyarakat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Pembangunan mesti berwawasan konservasi lingkungan, dan berlandaskan nilai yang mencegah dehumanisasi, sebagai peleburan nilai inheren peranan ganda manusia sebagai khalifah dan hamba Allah, sehingga terbuka pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa memencilkan manusia dari Tuhan, dari sesamanya dan dari alam sekitarnya. Proses pembangunan menekankan partisipasi rakyat.

Bagaimana realisasinya melalui pendidikan, Prof. Garnadi Prawirosoedirdjo (alm.) mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

Yang penting para dosen, para pendidik pada umumnya tidak membatasi orientasi ilmunya pada alam yang nampak saja melainkan meluaskan perhatian dan batinnya ke dunia yang non-metrikal atau ekstra-saintik yang lazim disebut dunia transenden itu. Seorang dosen yang bersikap dan berbuat demikian melaksanakan apa yang kami sebut spiritualisasi pendidikan.
(Garnadi Prawirosoedirdjo, 1982, h.9).

4. Relevansi Pendidikan Luar Sekolah dan Pembangunan Pedesaan

Masih nampak kuat kecenderungan, kota maju dan desa tertinggal; keadaan yang serba dualistis menurut teori Boeke, baik ditinjau dari segi sosial maupun ekonomi masih kuat membekas. Telah banyak usaha--termasuk melalui pendidikan--untuk mengatasi stagnasi, kebekuan dalam pertanian di desa pulau Jawa yang disebut involusi pertanian (Geertz).

Kecenderungan strategi yang dipergunakan dalam rangka modernisasi pedesaan yang masyarakatnya mayoritas petani itu berlandaskan asumsi bahwa kualitas hidup masyarakat yang berkecenderungan memiliki ciri-ciri tradisional itu akan meningkat apabila warga masyarakatnya mengalami peningkatan dalam hal pendapatannya, memiliki akses dan peluang yang

lebih besar untuk berpartisipasi dalam kelembagaan masyarakat yang ada, dan memanfaatkan jasa dari "dunia luar" yang telah maju. Hambatan untuk mencapai tujuan itu sering ditimpakan kepada warga masyarakat itu sendiri yang dianggap terlampau kolot, terlampau miskin, atau dianggap tidak tanggap untuk mengadopsi inovasi yang diperlukan.

Pandangan tersebut cenderung memahami suatu program yang diluncurkan ke arah kelompok sasaran di daerah pedesaan akan menimbulkan perubahan secara mekanistik dan melupakan hambatan untuk menuju perubahan itu sebagian di antaranya adalah tertumbuk pada faktor struktural dan kultural yang ada di masyarakat itu, di mana di dalamnya berlangsung interaksi berbagai kekuatan dengan berbagai arah yang mungkin saling mendukung atau sebaliknya saling memperlemah.

Untuk memahami dampak suatu program pendidikan luar sekolah adalah tidak memadai apabila hanya ditujukan pada hasil akhir, tetapi juga perlu dipelajari dari prosesnya dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang ada di pedesaan sebagai sebuah sistem sosial. Makin mampu dipahami elemen-elemen yang determinan dalam masyarakat di sekitar program, maka makin besar kemungkinannya elemen-elemen itu dikontrol untuk mendukung peningkatan keberhasilan program hingga maksimal.

Jika program pendidikan luar sekolah ditinjau kedudukannya dalam konteks pembangunan pedesaan maka ada dua kemungkinan paradigma yang dapat dipakai. Pertama, pendidikan luar sekolah merupakan subsektor dari beberapa sektor lainnya. Implikasinya adalah pada perencanaan, yakni program pendidikan luar sekolah itu tidak berdiri sendiri, dan dirancang untuk mendukung sektor lainnya. Kedua, pendidikan luar sekolah merupakan satu sektor yang berdiri sendiri dalam sebuah perencanaan umum dalam rangka modernisasi pedesaan. Menurut paradigma kedua

tersebut, program pendidikan luar sekolah dipandang sebagai kegiatan pendidikan yang dapat secara langsung mempengaruhi tercapainya modernisasi tingkat pedesaan. Dalam studi ini, pendidikan luar sekolah dipahami sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, apapun bentuk programnya tak akan kuasa untuk langsung mencapai tujuan modernisasi, karena untuk itu diperlukan kondisi-kondisi tertentu sehingga dampak program dapat semakin meluas dan mendalam.

Munculnya isu pembangunan pedesaan dapat ditilik dari beberapa argumentasi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif menunjukkan bahwa sebanyak 80 persen penduduk di Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Bahkan dalam skala yang lebih luas, UNESCO (1972, h. 57) memperhitungkan dan memproyeksi kecenderungan jumlah penduduk yang terdapat di daerah pedesaan, khususnya di negara berkembang di benua Asia pada tahun 1960 - 1980 sebanyak 67 persen, sedangkan sisanya yaitu 33 persen penduduk perkotaan. Pada tahun 2000 yang akan datang, diperkirakan jumlah penduduk di pedesaan akan tetap lebih banyak.

Dalam kerangka pembangunan nasional, pembangunan lokal tingkat pedesaan menempati kedudukan penting. Beberapa alasannya adalah: (1) pendapatan nasional sebagian berasal dari pedesaan; sumbangannya adalah sebanyak 32 persen pada tahun 1978, dan kebutuhan masyarakat disuplai sebanyak 60 persen (Suparmoko, 1982, h. 15); (2) jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan seperti dikemukakan di atas masih tetap dominan; dan (3) kondisi masyarakat pedesaan yang masih kekurangan dalam pemenuhan aspek kebutuhan primer dan sekunder, bertalian dengan masalah kritis di bidang pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, kemiskinan dan tuna aksara.

Karena itu pembangunan tingkat pedesaan memerlukan kebulatan yang utuh dalam pembinaan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan produksi, dan kelembagaan. Hal ini bukan berarti, masalah-masalah di perkotaan dapat diabaikan, sehingga program pendidikan luar sekolah tak perlu diarahkan ke sana. Dalam kenyataannya lingkungan perkotaan juga mempunyai dimensi-dimensi permasalahannya sendiri, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Masih banyak warga kota yang memerlukan pendidikan dalam arti luas untuk merekonstruksi kembali pengalamannya atau mengubah sikap dan pola tingkah lakunya agar sesuai dengan tuntutan perubahan di sekitarnya. Jadi, isu pembangunan pedesaan itu bertalian dengan strategi pembangunan nasional dan prioritas dalam rangka menciptakan perubahan sosial.

Apabila ditinjau dari berbagai bentuk ketertinggalan dan "dalamnya" masalah yang diderita oleh masyarakat pedesaan, maka makin jelas bahwa mustahil pendidikan itu dapat berdiri sendiri untuk mengatasi masalah-masalah itu. Karena itu, apabila ditinjau dari pendekatan pembangunan pedesaan, maka pendidikan berfungsi untuk mendukung sektor lainnya. Seperti kata Shills dan Anderson, meskipun pendidikan itu memberikan pengaruh nyata dalam memupuk loyalitas nasional, menciptakan ketrampilan dan sikap yang esensial bagi inovasi teknologi, namun Anderson juga mengatakan dengan mengandalkan pendidikan saja hal itu tidak cukup karena lingkungan sosial pendidikan juga memberikan pengaruh nyata dan menentukan (Weiner, 1960, h. 9).

Kedudukan program pendidikan luar sekolah sebagai subsektor dari aktivitas pembangunan dan modernisasi pedesaan akan lebih jelas apabila kita amati kenyataan yang ada dalam penerapannya, misalnya dalam Program Kejar Paket "A" yang dipadukan dengan pendidikan mata pencaha-

rian. Tujuan program tersebut antara lain adalah untuk membekali para warga belajar dengan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif sebagai sumber mata pencaharian tetap atau pencaharian pelengkap. Dalam pengembangan program tersebut, asumsinya adalah bahwa produktivitas investasi pendidikan luar sekolah itu relatif lebih tinggi daripada pendidikan formal sehubungan dengan keluasan ruang fleksibilitasnya untuk menyelaraskan kegiatannya dalam kerangka sosial dan bahkan dengan kelembagaan yang ada di masyarakat, di samping programnya berlangsung dalam periode waktu yang relatif singkat dan dapat dihubungkan langsung dengan pemenuhan permintaan akan tenaga kerja.

Akan tetapi, hasil program yang dimaksud itu pada akhirnya juga tergantung pada kemampuan para perencana dan pelaksana untuk menciptakan mata rantai antara program itu dengan sektor pembangunan lain dalam sebuah sistem yang lebih luas. Yang penting lagi adalah, produktivitas investasi itu dipengaruhi pula oleh kemampuan para perencana dan pelaksana untuk mempermulus nilai transfer program pendidikan dan aplikasi tingkah laku baru ke dalam kehidupan nyata.

Akan menjadi lebih jelas lagi bagaimana kedudukan program pendidikan luar sekolah apabila kita perhatikan suatu analisis yang berpegang pada teori sistem. Berbagai pendapat yang mengungkapkan hakikat masyarakat seperti dikemukakan Sanders (1958), Parsons (1951), Loomis (1960), Poplin (1972), Edwards dan Jones (1976), kesemuanya menjelaskan bahwa masyarakat itu merupakan sebuah entitas, sebuah sistem sosial yang memiliki elemen atau bagian-bagian yang membangun struktur dan setiap bagian itu memiliki fungsinya masing-masing untuk mempertahankan eksistensi entitas itu.

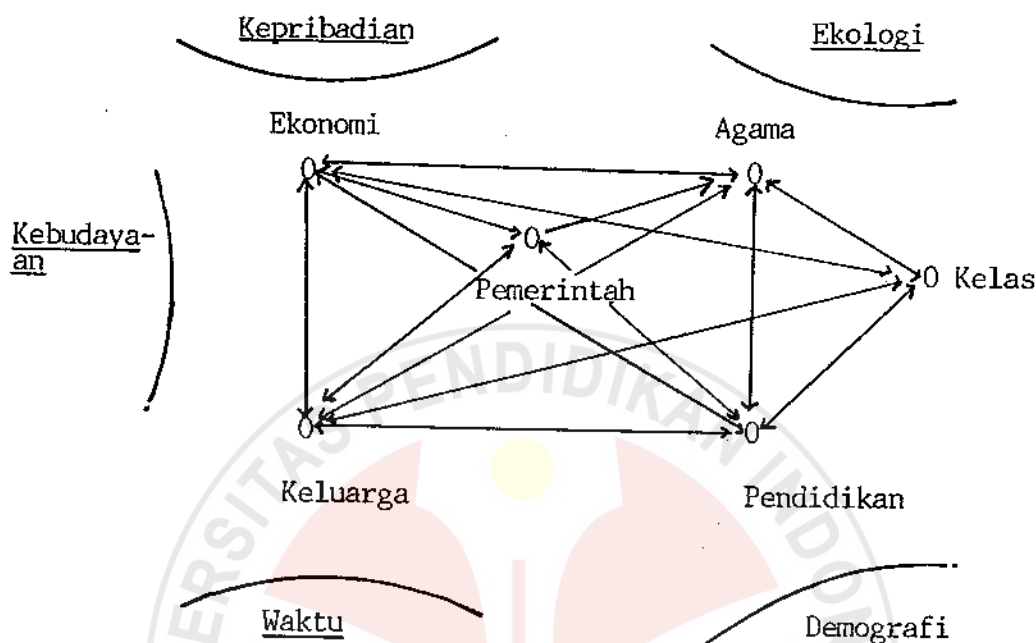
Masyarakat yang dikonsepsikan sebagai sebuah sistem sosial menunjukkan bagian-bagian yang berbeda dari sebuah struktur yang kaitannya satu sama lain terjalin dan terorganisasi sedemikian erat. Hubungan antara bagian dalam struktur sosial itu dipertahankan lewat interaksi yang saling pengaruh mempengaruhi, dan interaksi itu diikat dan dituntun oleh norma dan nilai. Masyarakat mempertahankan eksistensinya melalui aktivitas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhannya dan hubungannya dengan pihak lain di luar masyarakat itu.

Interaksi antara elemen sedemikian kompleks, sehingga di dalamnya juga terdapat kekuatan yang mempengaruhi perubahan. Kekuatan itu ada yang bersifat sebagai pendorong, penahan dan pengganggu (Lippit, 1958, Anwar, 1982, h. 35-36). Watson (1966) menganalisis kekuatan yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu (1) faktor yang berakar pada kepribadian seseorang individu, dan (2) faktor yang berakar pada sistem sosial itu sendiri (Zaltman, Kotler dan Kaufman, 1972, h. 610-617).

Edwards dan Jones (1976, h. 15) mengidentifikasi subsistem dalam sebuah sistem sosial yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pembagian tersebut tak berbeda dengan subsistem yang dikemukakan Sanders (1958) yaitu: pemerintah, keluarga, pendidikan, ekonomi, agama dan kelas (Surya Anwar, 1982, h. 187-191). Di balik keenam subsistem itu terdapat kekuatan lain yang ikut mempengaruhinya yaitu faktor ekologi, demografi, kebudayaan, kepribadian, dan waktu. Konfigurasi hubungan antara subsistem seperti dalam Gambar 1 pada halaman 48 berikut ini.

Dengan demikian cukup jelas bahwa cukup banyak sumber kekuatan yang dapat menciptakan perubahan sosial. Namun demikian, pendekatan pendidikan justru menciptakan perubahan yang paling mendasar pada diri

individu. Lerner (1958) mengungkapkan kedudukan individu sebagai kunci dari awal perubahan sosial. Yang dibutuhkan untuk berubah adalah sikap, nilai dan aspirasi dari individu-individu. Dari hal itu, kemaslahatan yang bersumber dari modernisasi dapat diraih (McAnany, 1980, h. 2).



Gambar 1: Hubungan antar Elemen dalam Sebuah Sistem Sosial
(Sanders, 1958; Surya Anwar, 1982)

Model tersebut di atas melukiskan interaksi antara berbagai faktor yang kompleks dalam masyarakat yang telah disederhanakan. Di antara berbagai pranata yang ada, maka dapat ditambahkan pranata pertahanan yang relevan bagi setiap tingkatan kemajuan suatu masyarakat, apakah bagi masyarakat yang masih bersahaja--primitif-- atau bagi masyarakat modern. Pranata penting lainnya adalah rekreasi, yang bermanfaat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekunder dalam arti sempit seperti

kegiatan "melepaskan" lelah dalam waktu senggang, namun demikian pranata yang dapat menyalurkan sifat hakiki manusia sebagai mahluk bermain (homo luden) itu juga mampu memenuhi dorongan-dorongan lainnya pada setiap tingkatan usia dan jenis kelamin, seperti dorongan untuk berafiliasi satu sama lain sambil menikmati satu aktivitas yang konstruktif baik bagi kesehatan jasmani maupun rohani.

Di negara maju, seperti halnya di negara industri, adanya perluasan dalam pelayanan jasa untuk memenuhi berbagai keperluan warga masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan waktu senggang dan standar hidup, maka rekreasi merupakan salah satu kegiatan integral dalam kehidupan. Berbagai bentuk kegiatan rekreasi, baik yang aktif maupun pasif, menjelma menjadi satu kebutuhan yang esensial bagi suatu komunitas bahkan negara untuk mempertahankan keberadaannya sebagai satu entitas yang utuh. Spesifikasi keahlian dan mekanisasi dalam berbagai kegiatan manusia pada gilirannya memencilkan manusia dari sesamanya dan dari alam sekitarnya. Karena itu, rekreasi sebagai sebuah pranata sosial sedemikian penting kedudukannya untuk mengembalikan manusia ke harkatnya yang hakiki. Karena sudah menjadi kebutuhan, maka tak mengherankan kegiatan rekreasi itu masuk dan dikelola dengan baik dalam berbagai lingkungan seperti di lingkungan sekolah, industri, perhimpunan pemuda dan sebagainya.

Untuk memahami relevansi pendidikan luar sekolah dan pembangunan pedesaan, perlu ditinjau konsep pembangunan pedesaan itu sendiri. Ada beberapa pengertian yang sering dipakai sebagai acuan seperti yang dirumuskan oleh Warent (1978), Sanders (1958) dan PBB (1963) Seperti dipaparkan kembali oleh Christensen dan Robinson, Jr. (1980, h. 4), maka pokok pengertian pembangunan pedesaan seperti berikut ini.

Menurut Warent, pembangunan pedesaan adalah suatu proses untuk menolong masyarakat desa menganalisis masalahnya dan mempraktekkan se-luas mungkin otonominya dan untuk mendorong identifikasi yang lebih be-sar dari warga masyarakat dan organisasi dengan masyarakat sebagai satu keseluruhan. Pengungkapan pengertian pembangunan pedesaan yang le-bih operasional dikemukakan oleh Sanders, yakni dapat dipahami sebagai: (1) proses--tekanannya pada tahap perubahan; (2) metode--tekanannya pada prosedur kerja untuk mencapai tujuan tertentu; (3) program--tekanannya pada spesialisasi kegiatan, seperti keluarga berencana, keaksaraan dan sebagainya; dan (4) gerakan --ditandai oleh kegiatan kolektif, terlem-baga, melibatkan tenaga profesional dan penggunaan prosedur; ide di-turunkan menjadi kegiatan nyata.

Uraian Sanders tentang makna pembangunan pedesaan adalah semacam taksonomi yang bukan saja berguna untuk menganalisis pembangunan pede-saan tetapi juga sekaligus menunjukkan realisasi kegiatan pembangunan yang membutuhkan dukungan disiplin ilmu yang relevan. Sebagai sebuah pro-ses, maka pembangunan pedesaan merupakan rangkaian pertumbuhan dan per-kembangan dinamik yang berorientasi ke arah gerakan maju. Sebagai me-tode, diterapkan prosedur kerja yang sistematis, berlandaskan azas-azas pokok tentang manajemen perubahan seperti perencanaan "cause" (tujuan sosial) yang tepat, strategi yang dipakai, segmentasi sasaran, penataan paket informasi atau inovasi, sistem peluncurannya, bahkan juga teknik evaluasinya. Berdasarkan taksonomi Sanders, maka Program Kejar Paket "A" misalnya, tepat dikatakan sebagai program. Namun apakah realisasi dari kemauan politik pemerintah untuk memperluas kesempatan memperoleh pen-didikan sudah menjadi suatu aksi sosial, nampaknya masih membutuhkan peningkatan. Untuk melaksanakannya, maka masyarakat cenderung

masih banyak bergantung pada pengadaan input dari pemerintah.

Definisi pembangunan pedesaan menurut PBB adalah sebagai berikut:

. . . the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social, and cultural conditions of the communities, to integrate these communities into the life of nation, and to enable them to contribute fully to national progress. This complex of processes is, therefore, made up of two essential element: the participation by people in efforts to improve their level of living, with as much reliance as possible on their own initiative, and the provision of technical and other services in ways which encourage initiative, self help and mutual help and make these more effective. It is expressed in programmes designed to achieve a wide variety of specific improvements.
(Christensen dan Robinson, 1980, h. 12).

Definisi tersebut mengandung beberapa pengertian pokok. Pembangunan pedesaan sebagai sebuah proses yang bertumpu pada usaha dan upaya masyarakat itu sendiri di arahkan ke segenap kegiatan perbaikan dan peningkatan dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya yang kesemuanya tidak terpisah-pisah tetapi dipadukan dengan pembangunan dan kemajuan nasional. Dalam proses yang kompleks itu, ada dua pra syarat penting yang berakar pada kualitas mental yaitu, (1) partisipasi dan kepercayaan penuh pada masyarakat; (2) penyediaan teknologi dan jasa lain yang membangkitkan inisiatif dan swadaya dari masyarakat.

Awal dari dinamika masyarakat adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Aktivitas yang ditujukan ke arah perbaikan-perbaikan itu dapat dimulai dari dalam masyarakat itu sendiri; ada semacam ekspansi kemampuan sekelompok orang untuk memecahkan masalahnya, menguasai lingkungan dan hari depannya. Dengan demikian jelaslah bahwa faktor psikis berupa transformasi sikap atau nilai-nilai merupakan aspek penting dari pembangunan pedesaan. Tidak mengherankan jika Santoso (1968, h. 2) menyimpulkan hakikat pembangunan pedesaan sebagai proses edukasi, difusi, atau komunikasi.

Sifat edukatif dalam pekerjaan membangun masyarakat pedesaan terkandung dalam upaya "menanamkan sikap atau mental secara radikal ke dalam cipta dan rasa manusia (Brunner, 1954; Santoso, 1968, h. 2).

Dikatakan sebagai pendidikan dalam arti luas, karena pembangunan masyarakat pedesaan itu dapat disebut sebagai satu gerakan untuk menukarkan ide agar tidak sekedar terapung tetapi menjadi satu aksi sosial yang terlembagakan dan melibatkan petugas atau ahli dengan berbagai julukan, apa dia disebut "guru", "tenaga perubah", "fasilitator" dan sebagainya. Aksi itu memiliki tujuan tertentu yang bersifat teleologik, sebagai intervensi dengan sengaja dan berencana yang amat peduli dengan perubahan menuju arah kemajuan dan perbaikan sehingga aspek proses di situ merupakan ciri yang menonjol.

Prosesnya tak lain adalah proses ajar (learning) yang menghasilkan perubahan dalam aspek psikis dan sosial. Dalam aksi itu juga terdapat metode dengan isi yang lebih spesifik yaitu dihubungkan dengan bidang tertentu seperti program keaksaraan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian dan lain-lain. Programnya diluncurkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berangkaian atau mungkin sebagai paket-paket yang bersifat simultan.

Tinjauan Santoso terhadap pembangunan pedesaan sebagai proses difusi atau komunikasi, rupanya cenderung ditilik dari proses dan sifat penyebaran spektrum informasi dalam rangka mengubah sikap atau membentuk pola tingkah laku baru. Analisis ini cenderung dipengaruhi oleh pandangannya sebagai ahli komunikasi, tetapi juga ada pengaruh dari paradigma antropologi yang memahami masyarakat pedesaan cenderung memiliki ciri-ciri tradisional sehingga pembangunan pedesaan tak lain semacam proses modernisasi melalui akulturasi.

Bagi bangsa Indonesia, pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan pedesaan bukan berarti sekedar peningkatan produksi, perluasan lapangan kerja, kemudahan memperoleh rezki, atau memperlancar pemasaran produksi petani, tetapi mencakup aspek kemanusiaan yang luas. Bertolak dari asumsi bahwa pembangunan itu dimulai dari pembangunan manusia, maka Mubyarto dkk merumuskan pembangunan manusia seutuhnya dalam konteks pedesaan adalah: "kemajuan yang mantap dan terus menerus dalam kondisi kehidupan yang mengandung unsur kebebasan, kebahagiaan, dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat"(Mubyarto, Soetrisno, dan Dove, 1984, h. 7).

Kelima unsur kehidupan yang bebas, bahagia dan aman itu meliputi komponen (1) mutu kehidupan fisik; (2) mata pencaharian; (3) individualitas dan kebebasan memilih; (4) pengembangan diri; dan (5) perkembangan sosial-politik. Dalam kelima unsur kehidupan yang bebas, bahagia dan aman itu nampak pengaruh pandangan kaum humanis tentang hakikat pembangunan sebagai pembebasan dari kekuatan yang mengekang perwujudan potensi manusia.

Coombs, dkk (1973) juga nampak dipengaruhi oleh konsep pembangunan alternatif dalam menganalisis elemen pembangunan pedesaan, yang meliputi: (1) produksi dan pendapatan; (2) redistribusi pendapatan; (3) perluasan lapangan kerja; (4) land reform; (5) kesehatan, nutrisi, perumahan yang lebih baik; (6) kesempatan pendidikan; (7) swakelola dan koperasi; dan (8) keadilan sosial (Kindervatter, 1979, h. 53).

Apabila kita simak konsep pembangunan berarti penyempurnaan, pertumbuhan, dan perubahan menurut Kim (1973), maka elemen mutu kehidupan fisik dan mata pencaharian dalam konsep Mubyarto dkk tadi analog dengan pengertian pembangunan sebagai pertumbuhan yang mencakup trans-

formasi teknologi dan ekonomi. Elemen individualitas dan kebebasan memilih, dan elemen pengembangan diri analog dengan makna pembangunan sebagai penyempurnaan yang berarti transformasi sosial dan psikologis dalam masyarakat. Sedangkan elemen perkembangan sosial-politik adalah analog dengan makna pembangunan sebagai perubahan yang berorientasi ke- kepada penataan kembali struktur ekonomi dan sosial yang bersifat nor- matif..

Santoso mengemukakan asas pokok pembangunan pedesaan yaitu (1) dinamisasi (2) modernisasi, dan (3) demokratisasi (Santoso, 1973, h. 2). Ketiga azas itu pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain. Faktor dinamisasi yang diharapkan merasuk ke dalam setiap jenis akti- vitas manusia itu merupakan refleksi dari sifat individualitas dan kebebasan memilih, sedangkan faktor demokratisasi merupakan refleksi dari perkembangan sosial dan politik. Dalam pada itu, faktor modern- isasi sebagai pertumbuhan sosial dan ekonomi tercermin dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder atau dalam mutu kehidupan fisik dan mata pencaharian yang lebih baik seperti konsep Mubyarto dkk tadi.

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa konsep pembangunan pedesaan itu berbeda-beda antara penulis yang satu dengan yang lain hanya dalam aksentuasi pengertian tertentu atau berbeda dalam tingkat- an abstraksi pengertian yang dipaparkan. Bahkan ada di antara penulis yang lebih suka memperinci indikatornya satu persatu seperti yang di- rumuskan oleh Edwards dan Jones (1976, h. 31) yakni: perluasan pedesaan, baik dilihat dari jumlah penduduk dan areal tanah; peningkatan produkti- vitas ekonomi berdasarkan peningkatan dan pemanfaatan sumber daya enersi yang bukan berasal dari manusia atau hewan; peningkatan spesialisasi ekonomi dan pe- ranan okupasional; peningkatan partisipasi dalam ekonomi pasar; pening-

katan mobilitas sosial dan geografik penduduk pedesaan yang mencerminkan peningkatan kebebasan mereka dari keterikatan tradisional; peningkatan pemakaian alat transportasi yang efisien; peningkatan taraf pendidikan warga masyarakat; peningkatan kerangsangan masyarakat terhadap media massa seperti radio, surat kabar, televisi dan media massa lainnya; peningkatan jumlah organisasi dengan tujuan khusus dan dalam semua subsistem yang berbeda, dan peningkatan jumlah orang yang berpartisipasi dalam organisasi itu, peningkatan jumlah anggota masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemungutan suara, membuat keputusan dan sebagainya; peningkatan keragaman peranan yang dimainkan warga masyarakat sehubungan dengan kegiatan di luar pedesaan; peningkatan pluralisme dalam nilai dan norma masyarakat; dan peningkatan dalam hal interdependensi antara subsistem masyarakat dengan sistem di luarnya.

Berbagai bentuk peningkatan tersebut di atas sudah tentu memiliki tingkatannya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan yang sebelumnya sudah dicapai oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Istilah peningkatan dan penyempurnaan itu merupakan kata kunci yang penting dalam pembangunan pedesaan. Hidup di daerah pedesaan berarti tinggal pada margin subsisten yang membangkitkan citra serba terbatas dalam penyediaan dan pelayanan barang serta jasa. Karena itu pembangunan pedesaan itu juga berkenaan dengan perluasan kriteria yang dipakai dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa yang di dalamnya juga terkandung kemungkinan adanya korban-korban sebagai eksekusi pembangunan.

Apabila kita teruskan analisis terhadap makna pembangunan pedesaan, maka akan kita jumpai konsep-konsep yang padat maknanya. Lerner (1958) mengartikannya dalam istilah modernisasi yang ditandai dengan

kapasitas yang tinggi untuk mengidentifikasi aspek baru dalam lingkungan. Apter (1965) menekankan aspek modernisasi budaya; menjadi modern berarti melihat kehidupan sebagai alternatif dan pilihan, mampu berinisiatif dan memilih perubahan. Frey (1971) menekankan kepribadian modern yang ditandai dengan sikap positif terhadap perubahan. Hagen (1963) menekankan otonomi, motif berprestasi dan kebutuhan akan tatanan untuk perkembangan ekonomi.

Jadi dapat dikatakan, modernisasi tingkat pedesaan itu adalah semacam transformasi cara berfikir ke arah yang baru dan gaya hidup baru. Dengan demikian inti maknanya tak lain adalah akulturasi.

Beberapa tulisan telah mengungkapkan kontribusi pendidikan untuk mencapai modernisasi. Weiner (1966, h. 6) yang mensistesis beberapa karangan tentang modernisasi mengemukakan beberapa elemen untuk mencapai modernisasi yaitu pendidikan, komunikasi, ideologi, nasionalisme, kepemimpinan kharismatik, dan pemerintah otoriter.

Sebagai variabel bebas yang determinan untuk menimbulkan perubahan, Santoso dalam makalahnya yang berjudul "Mempersiapkan Masyarakat Pedesaan untuk Menerima Teknologi" (1974) mengungkapkan dan mempertegas kembali hasil penelitian Lerner yang membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya tentang proses modernisasi di beberapa negara Timur Tengah. Sari kesimpulannya yang penting adalah, bahwa urbanisasi meningkatkan kemampuan baca-tulis-berhitung (literacy) yang kemudian meningkatkan kerangsangan terhadap media (media exposure), dan hal ini selanjutnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi, sosial, dan politik. Santoso juga mengemukakan hasil penelitian Alex Inkeles yang melakukan studi terhadap beberapa negara berkembang dengan kesimpulan penting adalah, bahwa pendidikan merupakan variabel bebas utama

untuk mempengaruhi proses modernisasi dan masyarakat yang berpartisipasi.

Curle (1970) menunjukkan bahwa pendidikan merupakan satu sumber kekuatan yang berpengaruh besar terhadap perubahan sosial dan ekonomi (Hunter, Borus, dan Mannan, 1974, h. 165). Di bagian lain, Hunter dkk itu mengatakan, investasi dalam pendidikan luar sekolah pada tingkat makro cenderung membangkitkan kekuatan perubahan yang agaknya mempengaruhi gaya hidup dan sistem nilai dalam suatu masyarakat. Pendidikan luar sekolah merupakan penghubung dari sebuah "mata rantai yang hilang" antara pendidikan dan ekonomi.

Jika tujuan modernisasi tingkat pedesaan pada hakikatnya adalah modernisasi manusia desa, sebaiknya bagaimanakah pendidikan luar sekolah yang relevan?

Coombs, Prosse dan Ahmed (1973) lebih banyak menekankan dan mempersoalkan potensi pendidikan luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar minimum yang esensial bagi anak muda atau bahkan bagi orang dewasa yang terlalaikan pendidikannya. Mereka juga mengemukakan potensi pendidikan luar sekolah untuk memacu akselerasi pembangunan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta penyediaan lapangan kerja di pedesaan. Makna pendekatan "kebutuhan belajar minimum yang esensial" menurut Coombs meliputi kegiatan mempersiapkan anak muda untuk memikul tanggung jawab orang dewasa yang memiliki sikap positif; ketrampilan baca-tulis-berhitung fungsional; pandangan ilmiah; ketrampilan dan pengetahuan vokasional; ketrampilan dan pengetahuan untuk berpartisipasi sebagai warga negara (Kindervatter, 1979, h. 54).

Kalau kita selami konsep yang dikembangkan Kindervatter (1979) dalam disertasinya dengan mengangkat kasus program pendidikan luar

sekolah di Indonesia dan Thailand, wawasannya sejalan dengan konsep pembangunan tingkat makro nasional atau mikro individual yang dikemukakan oleh Bryant dan White (1982) seperti telah dipaparkan di muka, yaitu pembangunan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan "empowerment". Kinder-vatter sampai pada sebuah konsep inti, bahwa pendidikan luar sekolah merupakan proses empowering. Maksudnya adalah, bahwa melalui pendidikan maka warga masyarakat memperoleh pengertian dan kemampuan untuk mengontrol kekuatan sosial, ekonomi dan/atau politik guna menyempurnakan kedudukan mereka di masyarakat.

Sebagai subsistem pendidikan yang tujuannya bersegi banyak, Santoso (1968, h. 6) mengemukakan, pendidikan luar sekolah bertujuan untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial, tanpa mengabaikan aspek spiritual dan kultural sehingga aspek ini diperhatikan dalam kurikulum atau perumusan tujuan kurikulum.

Jadi, beberapa pemikiran di atas menempatkan pendidikan luar sekolah sebagai satu sumber kekuatan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai hal yang ada di sekitarnya, seperti kekuatan pengendali yang terdapat di lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Pemikiran tersebut di atas mendudukan pendidikan luar sekolah dalam sebuah kerangka pembangunan. Oleh karena pembangunan itu memiliki konteks yang berbeda-beda di antara berbagai negara, maka memang sukar bagi kita untuk memperoleh suatu perumusan tujuan yang universal, melainkan ada tekanan pada aspek tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula.

LaBelle justru menekankan pendidikan luar sekolah untuk mendukung terjadinya perubahan sosial, yakni suatu perubahan, bukan saja perubahan tingkah laku manusia dan perubahan yang berkenaan dengan hubungan tingkah laku itu sendiri dengan lingkungan fisik dan ke-

menusiaan, akan tetapi juga dibutuhkan perubahan dalam struktur dan peraturan di dalam masyarakat yang memungkinkan tingkah laku baru dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya dapat tercipta kembali (LaBelle, 1976; Kindervatter, 1979, h. 51).

Untuk mencapai tujuan tersebut LaBelle mengidentifikasi lima prinsip yaitu:

- (1) memahami kebutuhan klien;
- (2) melibatkan klien dalam kegiatan belajar mereka;
- (3) memperlancar transfer dan aplikasi tingkah laku baru di dalam lingkungan sekitar;
- (4) menciptakan mata rantai antara program dengan komponen dalam sistem yang lebih luas;
- (5) menyediakan insentif yang sifatnya eksternal dan internal bagi program.

Menurut LaBelle, kelima prinsip tersebut perlu dilengkapi dengan "multiple intervention" yang mencakup "ideologi", "teknologi" dan "organisasi sosial". Program pendidikan yang menekankan "ideologi" titik beratnya adalah pada penyampaian informasi dan kebangkitan kesadaran. Yang menitik beratkan aspek "teknologi" menekankan penyampaian ketrampilan, dan yang menitik beratkan "organisasi sosial" menekankan pengembangan kelembagaan yang ada di dalam masyarakat seperti koperasi, fasilitas pasar dan sebagainya. Konsep tersebut telah ada di Indonesia. Dalam sebuah bukunya yang berjudul Pendidikan Masyarakat (1956), Santoso menyimpulkan beberapa azas pendidikan masyarakat. Buku yang ditulisnya sekitar tiga dekade yang lampau itu masih relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Kelima azas itu adalah: (1) dinamisering dan swadaya masyarakat; (2) perbaikan penghidupan; (3) penambahan pengeta-

huan dan pengertian; (4) pembentukan kader masyarakat; dan (5) perkembangan jiwa dan usaha bergotong royong.

Azas swadaya yang ditonjolkan di situ tidak melupakan prinsip ko-partisipasi masyarakat dan pemerintah. Program pendidikan tidak semata-mata dihadirkan dari luar untuk masyarakat, tetapi dilancarkan bersama masyarakat dengan sasaran semua golongan dan jenis yang meliputi semua segi kehidupan terutama dalam lapangan sosial, ekonomi dan kultural (Santoso, 1956, Jilid I h. 56).

Ternyata konsep pembangunan yang berorientasi pada inisiatif masyarakat secara aktif dan sadar telah lama juga dikenal dalam konteks pendidikan luar sekolah. Di bagian lain dalam bukunya itu Santoso juga menulis bahwa pembangunan adalah "perkembangan"; jadi bukan saja segi kebendaan tetapi juga hasil dalam segi kemanusiaannya melalui peranan masyarakat yang aktif dan sadar. Dilanjutkannya, pendidikan masyarakat bertugas meletakkan dasar-dasar yang menghilangkan halangan psikologis yang dihadapi dalam setiap usaha yang menyentuh jiwa, sikap dan cara hidup masyarakat. Selain itu, pendidikan itu akan menggugah minat, perhatian dan swadaya masyarakat jika dikaitkan dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat.

Maka dalam bukunya jilid III, Santoso merinci karakteristik pelaksanaan pendidikan--dia memakai istilah pendidikan masyarakat pada waktu itu--yakni: (1) bersegi banyak; (2) usahanya luas; dan (3) isinya dalam. Pendidikan itu tidak hanya mengenai alam lahir dari kehidupan orang dan masyarakat, tetapi akan menyentuh pula jiwa dan cara hidup mereka.

Berdasarkan beberapa pokok fikiran dari para penulis tersebut tadi, maka jelaslah bahwa dalam konteks pendidikan luar sekolah, proses

transformasi sosial dan psikologis merupakan kebutuhan yang esensial dengan mempergunakan berbagai kegiatan. Ditinjau dari konteks pembangunan di Indonesia setelah merebut kemerdekaan, maka dalam tulisannya itu Santoso menegaskan, kegiatan pendidikan itu adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat penjajahan, baik dalam keseimbangan pribadi individu maupun dalam hidup bermasyarakat dan untuk menanamkan sifat-sifat baru atau menebalkan sifat-sifat yang tipis yang dibutuhkan untuk menyusun masyarakat baru (Santoso, 1956, h. 47).

Berbagai masalah yang rumit pemecahannya dan berbagai bentuk keterbelakangan masyarakat seperti tercermin dalam keadaan ekonomi yang lemah sama sekali tidak mungkin dihelai hanya oleh pendidikan. Kombinasi pendidikan dasar melalui jalur formal tradisional dan program pendidikan luar sekolah sekalipun tak akan mampu memecahkan persoalan yang amat mendalam itu. Karena itu, ditinjau dari strategi pembangunan pedesaan maka optimasi program untuk mencapai tujuannya akan tercapai apabila dilancarkan secara terpadu atau bahkan simultan.

Kamajuan yang dicapai oleh warga belajar di satu pihak, seperti peningkatan kapasitas menyerap informasi, mesti diimbangi oleh peluang yang lebih besar untuk melestarikan perubahan itu dan untuk menerapkan pola tingkah laku baru ke dalam kenyataan hidup sehari-hari. Ketrampilan produktif atau pengetahuan yang luas tentang sesuatu hal baru akan menjelma menjadi sumber daya bagi kegiatan produktif apabila ketrampilan dan pengetahuan itu berhasil dipadukan dengan kerangka sistem ekonomi yang lebih luas seperti dalam sektor produksi, distribusi atau pemasarannya.

Berkaitan dengan strategi peluncuran program, maka Mosher (1976, h. 30) mengemukakan pentingnya pelaksanaan program yang simultan dengan

contoh pembangunan pedesaan dalam konteks modernisasi pertanian. Yang dibutuhkan untuk dikembangkan secara simultan itu adalah pasar bagi produk pertanian, penyuluhan, penyediaan input pertanian di masyarakat setempat, kredit produksi, percobaan lokal dan transportasi menuju pasar. Jadi, investasi dalam pendidikan--meminjam konsep strategi simultan--akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar jika didukung oleh pra kondisi di lingkungan sekitarnya yang ikut mendukung atau memperkuat terjadinya kemajuan dan perubahan.

Berdasarkan tinjauan yang cukup luas tentang modernisasi pedesaan dan bagaimana eratnya perpautan antara program pendidikan luar sekolah untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka dapat dikemukakan kesimpulan dari kedua konsep pokok tersebut. Modernisasi pedesaan merupakan satu kegiatan operasional yang penting untuk mencapai tujuan konkrit dalam batas waktu relatif singkat. Premis utama yang dipakai adalah bahwa hakikat modernisasi pedesaan itu dimulai dari proses transformasi sikap dan sistem nilai yang terdapat di dalam masyarakat desa, bahkan juga transformasi cara berfikir dan gaya hidup manusia desa, terutama dapat beranjak dari kondisi yang serba diliputi oleh citra terbatas.

Oleh karena modernisasi pedesaan pada dasarnya adalah transformasi sosial dan psikologis yang dimulai pada tingkat individu dan kemudian menjalar hingga tingkat makro sistem sosial, termasuk juga transformasi teknologi dan ketrampilan agar supaya warga masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk peningkatan kualitas hidup mereka, maka perlu juga diperhatikan struktur sosial yang secara langsung mempengaruhi peranan seseorang dalam ruang sosial itu. Ini berarti, penataan kembali tatanan sosial dan ekonomi di lingkungan pedesaan merupakan kegiatan yang mendesak.